



**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA DEPOK
TAHUN 2017-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan serta Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kota Depok Tahun 2017-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA DEPOK TAHUN 2017-2025.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota, yang selanjutnya disebut Ripparkot adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kota untuk periode 2017-2025.
6. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
14. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
15. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
18. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
19. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
21. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
22. Kawasan Strategis Pariwisata Kota, yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kota yang mempunyai pengaruh penting dalam 1 (satu) atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, dan daya dukung lingkungan hidup.
23. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota, yang selanjutnya disingkat KPPK adalah kawasan pariwisata dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter produk dan tema pengembangan pariwisata alam, budaya, dan buatan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud Ripparkot adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Kota yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Ripparkot adalah:

- a. menetapkan kawasan strategis dan kawasan pengembangan pariwisata Kota;
- b. menjadi pedoman perencanaan detail pembangunan pariwisata Kota; dan
- c. menjadi pedoman untuk penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Kota.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 4

Peraturan Daerah ini merupakan penjabaran dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam:

- a. perencanaan kepariwisataan yang meliputi pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan, serta perencanaan kawasan strategis pariwisata kota dan kawasan pengembangan pariwisata kota; dan
- b. pengelolaan pembangunan kepariwisataan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Pembangunan kepariwisataan, meliputi:
 - a. pembangunan destinasi pariwisata;
 - b. pembangunan industri pariwisata;
 - c. pembangunan pemasaran pariwisata; dan
 - d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Ripparkot.
- (3) Ripparkot sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. tujuan;
 - c. sasaran;
 - d. arah pembangunan; dan
 - e. kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan dalam kurun waktu tahun 2017-2025.
- (4) Ripparkot ditujukan untuk menjawab isu strategis pembangunan kepariwisataan, meliputi:
 - a. pembentukan identitas pariwisata Kota;
 - b. peningkatan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Kota;
 - c. pengembangan SDM pendukung pariwisata;
 - d. pengembangan sumber daya wisata yang khas menjadi daya tarik wisata berdaya saing;
 - e. perlindungan terhadap sumber daya budaya dan lingkungan untuk mendukung pariwisata;
 - f. pengembangan potensi sektor lain untuk mendukung pariwisata;
 - g. pembangunan infrastruktur terpadu dan ramah lingkungan untuk mendukung pariwisata; dan
 - h. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.

BAB IV
PRINSIP, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pembangunan

Pasal 7

Pembangunan Kepariwisata Kota mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan meliputi:

- a. pembangunan kepariwisataan berkelanjutan;
- b. pembangunan kepariwisataan berbudaya;
- c. pembangunan kepariwisataan terpadu;
- d. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat;
- e. pembangunan kepariwisataan berkearifan lokal, berwawasan global.

Bagian Kedua

Visi dan Misi

Pasal 8

- (1) Visi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, adalah:
“MENJADIKAN DEPOK SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA PERKOTAAN YANG BERKELANJUTAN DAN BERDAYA SAING NASIONAL DAN INTERNASIONAL”.
- (2) Dalam mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan meliputi:
 - a. membangun destinasi pariwisata Kota yang memadukan sumber daya sejarah dan budaya, alam perkotaan, ilmu pengetahuan, dan mendorong perkembangan potensi sektor pembangunan Kota untuk mendukung terwujudnya pariwisata pendidikan dan perkotaan berdaya saing internasional;
 - b. membangun industri pariwisata yang berdaya saing internasional dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal untuk pembangunan masyarakat;

- c. membangun pemasaran pariwisata yang kreatif dan bertanggung jawab untuk menjaring pasar wisatawan yang berkualitas; dan
- d. membangun kelembagaan kepariwisataan yang terpadu dan handal untuk mendukung terwujudnya pariwisata sebagai sektor andalan pembangunan Kota dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Tujuan dan Sasaran

Pasal 9

- (1) Tujuan Pembangunan Kepariwisata Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, adalah:
 - a. mewujudkan pengembangan pariwisata pendidikan dengan memadukan daya tarik wisata sejarah dan budaya, alam perkotaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumber daya wisata sektor lain menjadi daya tarik wisata berdaya saing internasional;
 - b. mewujudkan keterpaduan pembangunan aksesibilitas, infrastruktur, fasilitas pariwisata, fasilitas umum dan pelayanan berciri khas lokal, berkualitas internasional, dan berwawasan lingkungan untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan dan masyarakat;
 - c. mewujudkan kesadaran kolektif dan kesiapan masyarakat untuk menjadi tuan rumah dan pelaku utama dalam pembangunan destinasi berdaya saing internasional;
 - d. mewujudkan pembangunan sistem industri pariwisata yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dan penerapan standar-standar internasional untuk meningkatkan daya saing;
 - e. mewujudkan kemitraan strategis yang berkinerja tinggi antara industri mikro, kecil, dan menengah dengan industri pariwisata untuk memperkuat rantai nilai produksi dan distribusi berbasis lokal;

- f. mewujudkan penguatan jejaring industri di tingkat nasional dan internasional untuk membangun industri pariwisata berkredibilitas tinggi;
 - g. mewujudkan sistem pemasaran pariwisata kreatif berbasis teknologi informasi untuk menjangkau pasar wisatawan berkualitas yang lebih luas;
 - h. mewujudkan pemasaran terpadu dan bertanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas dalam membangun citra sebagai destinasi pariwisata pendidikan dan perkotaan berdaya saing internasional;
 - i. mewujudkan tata kelola pariwisata terpadu untuk mendorong pencapaian kinerja pariwisata berkualitas internasional, koordinasi dan komitmen yang konsisten, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan dalam pembangunan kepariwisataan; dan
 - j. mewujudkan sistem pengembangan sumber daya manusia berkompetensi internasional untuk mendukung terwujudnya destinasi pariwisata berdaya saing internasional.
- (2) Sasaran pembangunan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, adalah:
- a. peningkatan produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan;
 - b. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
 - c. peningkatan jumlah perjalanan wisatawan nusantara; dan
 - d. peningkatan lama tinggal wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.
- (3) Indikator sasaran pembangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Arah pembangunan kepariwisataan

Pasal 10

Arah pembangunan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. pembangunan kepariwisataan yang berbudaya dan berkelanjutan;
- b. pembangunan kepariwisataan yang mengedepankan hak berwisata bagi wisatawan, serta kenyamanan hidup bagi masyarakat;
- c. pembangunan kepariwisataan yang memiliki keterpaduan seluruh sektor dan pemerintahan dalam mendukung upaya perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan;
- d. pembangunan kepariwisataan yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. pembangunan kepariwisataan yang mendukung penguatan identitas Kota.

BAB V
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA
Bagian Kesatu
Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata
Pasal 11

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

- a. pembangunan perwilayahan pariwisata Kota yang diarahkan untuk pengembangan daya tarik wisata sejarah dan budaya, alam perkotaan, dan ilmu pengetahuan berdaya saing internasional, mendorong pengembangan daya tarik wisata sektor lain untuk meningkatkan keragaman daya tarik wisata, memperkuat identitas sebagai destinasi pariwisata pendidikan/perkotaan berbasis pengetahuan, memberikan perlindungan terhadap keberlanjutan situ, serta mewujudkan pariwisata sebagai sektor unggulan pembangunan Kota;

- b. pembangunan daya tarik wisata sejarah dan budaya, alam perkotaan, dan ilmu pengetahuan diarahkan untuk meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan mendorong pertumbuhan daya tarik wisata lainnya;
- c. pembangunan aksesibilitas dan prasarana umum terpadu dan berkualitas internasional yang menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan wisatawan dan masyarakat;
- d. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata berciri khas bangunan Sunda dan Betawi, pelayanan bernilai kearifan lokal dan berstandar internasional;
- e. peningkatan potensi dan organisasi masyarakat sesuai dengan kapasitasnya untuk meningkatkan peran dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan berdaya saing internasional; dan
- f. pengembangan investasi pariwisata berbasis masyarakat dan sumber daya lokal untuk memberikan manfaat yang luas kepada pembangunan masyarakat.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 12

Strategi pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

- a. membangun Kawasan Pariwisata Kota, meliputi Kawasan Strategis Pariwisata Sejarah dan Budaya Kota Lama Depok dan sekitarnya, Kawasan Strategis Pariwisata Pendidikan Universitas Indonesia dan sekitarnya, Kawasan Strategis Pariwisata Alam Perkotaan Tapos-Cimanggis, Kawasan Pengembangan Agrowisata Sawangan-Bojongsari, dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kreatif Beji-Sawangan dan sekitarnya;
- b. menetapkan dan mengembangkan Pancoran Mas sebagai pusat pelayanan primer pariwisata Kota, serta Tapos dan Sawangan sebagai pusat pelayanan sekunder pariwisata Kota;

- c. mengembangkan jalur-jalur wisata tematik alam, sejarah dan budaya, kuliner, pendidikan, seni dan budaya, pariwisata kreatif, agrowisata, dan tema-tema lain yang khas dan berdaya saing, yang menghubungkan kawasan-kawasan pariwisata Kota dengan kawasan pariwisata di sekitarnya;
- d. mengembangkan program-program wisata kreatif, edukatif, dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan lama tinggal, pengeluaran wisatawan, dan jumlah kunjungan wisatawan;
- e. mengembangkan program-program wisata kreatif pada daya tarik wisata seni dan budaya tradisional, industri kreatif, dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. mengembangkan program-program wisata edukatif pada daya tarik sejarah, bangunan bersejarah atau warisan budaya, dan wisata alam perkotaan yang mampu meningkatkan kontribusi wisatawan dan penduduk terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota;
- g. membangun program-program wisata berwawasan lingkungan pada hutan-hutan kota dan situ-situ sebagai daya tarik wisata tematik berbasis sejarah dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. merencanakan interpretasi yang sesuai dengan karakteristik setiap daya tarik wisata Kota dan target pasar wisatawan;
- i. meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan, kualitas fisik dan pelayanan transportasi umum berbasis pariwisata dan ramah lingkungan, serta pengelolaan lalu lintas terpadu dan efektif yang menghubungkan seluruh daya tarik wisata di Kota;
- j. mengembangkan aksesibilitas terpadu, ramah lingkungan, dan berstandar internasional dari pintu masuk Indonesia dan destinasi pariwisata unggulan nasional;

- k. meningkatkan kualitas pelayanan prasarana umum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan sebagai destinasi pariwisata berdaya saing internasional;
- l. mengembangkan pusat informasi pariwisata, fasilitas akomodasi kelas bintang, daya tarik wisata, fasilitas rekreasi berstandar internasional dan berwawasan lingkungan di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Kota;
- m. mengembangkan fasilitas pariwisata berbasis masyarakat dan pelayanan pariwisata yang menerapkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Kota;
- n. membangun infrastruktur, muka bangunan, dan suasana fasilitas pariwisata dan fasilitas umum yang mencirikan budaya Sunda dan Betawi;
- o. mengembangkan mekanisme komunikasi yang efektif kepada masyarakat dengan memanfaatkan media dan teknologi informasi untuk meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pariwisata;
- p. membentuk dan mengembangkan kelompok penggerak pariwisata di seluruh kecamatan yang terdiri dari perwakilan seluruh kelompok masyarakat;
- q. mengembangkan pembinaan yang berkelanjutan terhadap kelompok penggerak pariwisata dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan berdaya saing internasional;
- r. menetapkan dan menerapkan standar dan pedoman bagi investasi pariwisata berbasis masyarakat dan sumber daya lokal di Kota;
- s. mengembangkan sistem informasi bagi investasi pariwisata berbasis masyarakat dan sumber daya lokal di Kota;
- t. mengembangkan mekanisme insentif bagi investasi pariwisata yang berbasis masyarakat dan sumber daya lokal.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Pariwisata Kota dan
Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota

Paragraf 1

Kawasan Strategis Pariwisata Kota

Pasal 13

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) memiliki kriteria:
 - a. memperkuat identitas sebagai destinasi pariwisata pendidikan dan perkotaan berbasis sejarah dan budaya, alam perkotaan, dan ilmu pengetahuan;
 - b. memberikan perlindungan terhadap keberlanjutan situ;
 - c. mewujudkan pariwisata sebagai sektor unggulan pembangunan Kota.
- (2) KSPK Kota, terdiri atas:
 - a. kawasan Strategis Pariwisata Sejarah dan Budaya Kota Lama Depok dan sekitarnya;
 - b. kawasan Strategis Pariwisata Pendidikan Universitas Indonesia dan sekitarnya; dan
 - c. kawasan Strategis Pariwisata Alam Perkotaan Tapos-Cimanggis.
- (3) Peta KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Rencana Pembangunan KSPK untuk Kawasan Strategis Pariwisata Sejarah dan Budaya Kota Lama Depok dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:

- a. tema utama pengembangan adalah pariwisata sejarah dan budaya;
- b. tema pendukung adalah pariwisata kreatif;

- c. sasaran pengembangan adalah pengembangan daya tarik wisata sejarah “Belanda Depok” dan kota lama Depok dalam mendukung pelestarian cagar budaya.

Pasal 15

Rencana Pembangunan KSPK untuk Kawasan Strategis Pariwisata Pendidikan Universitas Indonesia dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

- a. tema utama pengembangan adalah pariwisata pendidikan;
- b. tema pendukung adalah pariwisata belajar;
- c. sasaran pengembangan adalah pengembangan pariwisata pendidikan dan belanja sebagai motor bagi percepatan pembangunan kepariwisataan Kota.

Pasal 16

Rencana Pembangunan KSPK untuk Kawasan Strategis Pariwisata Alam Perkotaan Tapos-Cimanggis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:

- a. tema utama pengembangan adalah pariwisata alam situ;
- b. tema pendukung adalah pariwisata rekreatif edukatif;
- c. sasaran pengembangan adalah pengembangan situ sebagai daya tarik wisata tematik berbasis sejarah dan ilmu pengetahuan dalam rangka konservasi alam perkotaan.

Paragraf 2

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota

Pasal 17

- (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK) memiliki kriteria:
 - a. pengembangan daya tarik wisata sejarah dan budaya, alam perkotaan, dan ilmu pengetahuan berdaya saing internasional; dan
 - b. mendorong pengembangan daya tarik wisata sektor lain untuk meningkatkan keragaman daya tarik wisata.

- (2) KPPK Kota, terdiri atas:
 - a. Kawasan Pengembangan Agrowisata Sawangan-Bojongsari; dan
 - b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kreatif Beji-Sawangan.
- (3) Peta KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Rencana Pembangunan KPPK untuk Kawasan Pengembangan Argowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:

- a. tema utama pengembangan adalah agrowisata;
- b. tema pendukung adalah pariwisata rekreasi alam;
- c. sasaran pengembangan adalah meningkatkan nilai produksi pertanian di perkotaan sebagai daya tarik wisata.

Pasal 19

Rencana Pembangunan KPPK Kawasan Pengembangan Pariwisata Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

- a. tema utama pengembangan adalah pariwisata kreatif;
- b. tema pendukung pariwisata religi dan rekreasi;
- c. sasaran pengembangan adalah pengembangan produk pariwisata kreatif berbasis masyarakat untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan.

BAB VI

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 20

Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan standar, pedoman, serta mekanisme insentif dan disinsentif bagi usaha pariwisata yang menerapkan atau tidak menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dan standar internasional;

- b. peningkatan kualitas usaha dan produk industri mikro, kecil, dan menengah sebagai pendukung utama rantai nilai industri pariwisata Kota yang berdaya saing internasional;
- c. pembangunan iklim yang kondusif dalam rangka percepatan pembangunan kemitraan antara industri mikro, kecil, dan menengah dengan industri pariwisata yang berkelanjutan; dan
- d. pengembangan kemitraan berjangka panjang dengan industri pariwisata nasional dan internasional dalam rangka mewujudkan industri pariwisata Kota yang berstandar nasional dan internasional dan bertanggung jawab.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 21

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata, meliputi:

- a. mengembangkan identitas usaha pariwisata Kota yang kreatif melalui penciptaan suasana khas Sunda dan Betawi serta pelayanan kreatif kepada konsumen;
- b. mengembangkan sistem pengelolaan usaha pariwisata Kota yang menerapkan standar internasional melalui pembinaan dan fasilitasi sertifikasi internasional;
- c. menetapkan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan standar dan pedoman penerapan nilai kearifan lokal dalam pengelolaan usaha pariwisata;
- d. mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi usaha pariwisata yang berbasis atau tidak berbasis nilai kearifan lokal dan berstandar internasional;
- e. meningkatkan pembinaan industri-industri kreatif masyarakat skala mikro, dan mengembangkan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi untuk pembinaan industri kecil dan menengah secara intensif dalam pengembangan produk, pengelolaan program-program wisata kreatif, dan pemasaran produk dan program wisata kreatif;

- f. meningkatkan daya saing dan kredibilitas usaha industri mikro, kecil, dan menengah melalui penerapan standar internasional dan prinsip-prinsip ramah lingkungan;
- g. mengembangkan program-program kemitraan berkinerja tinggi antara industri mikro, kecil, dan menengah dengan usaha-usaha pariwisata Kota;
- h. mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi usaha pariwisata dan industri mikro, kecil, dan menengah yang telah menjalankan atau tidak menjalankan kemitraan yang saling menguntungkan dan memperkuat, berjangka panjang, serta memberikan manfaat ekonomi yang luas kepada masyarakat dan Kota;
- i. mendorong pengembangan program bersama dan terpadu dengan industri pariwisata skala nasional dalam penerapan standar nasional usaha pariwisata dan tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya;
- j. mendorong pengembangan program pembinaan berkelanjutan antara industri pariwisata skala internasional dengan industri pariwisata di Kota dalam penerapan standar internasional dalam pengelolaan usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan.

BAB VII

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 22

Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan sistem pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pemasaran pariwisata, serta mengembangkan mekanisme evaluasi pemasaran pariwisata Kota;

- b. pengembangan pasar wisatawan yang berkualitas dan lebih luas didasarkan pada penelitian pasar yang berkesinambungan, pemanfaatan media promosi yang kreatif berbasis teknologi informasi; dan
- c. pembangunan keterpaduan produk dan pemasaran pariwisata berbasis pendidikan dan perkotaan dengan pemasaran pariwisata Provinsi Jawa Barat dan Indonesia untuk memperkuat citra di tingkat nasional dan internasional.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 23

Strategi pembangunan pemasaran pariwisata, meliputi:

- a. mengembangkan pelayanan informasi pariwisata yang akurat, mutakhir, dan terpadu berbasis teknologi informasi;
- b. mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi untuk mengukur kinerja program-program pemasaran dengan capaian target jumlah kunjungan wisatawan;
- c. mengembangkan pasar wisatawan Kota diarahkan pada pasar pariwisata berkualitas, yaitu pasar pariwisata dengan lama tinggal yang panjang, pengeluaran berwisata yang besar, serta kesadaran terhadap kelestarian alam dan budaya yang tinggi;
- d. mengembangkan pasar wisatawan pelajar/mahasiswa dan wisatawan lainnya baik dalam negeri maupun mancanegara;

- e. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik, kebutuhan, dan preferensi pasar pariwisata utama dan potensial agar dapat memberikan pengalaman lebih kepada wisatawan, serta mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi dari wisatawan;
- f. menetapkan target jumlah wisatawan berdasarkan pertimbangan rata-rata jumlah kunjungan wisatawan Kota, target pertumbuhan wisatawan Jawa Barat dan nasional, serta kajian terhadap dampak dari perkembangan pariwisata Kota;
- g. meningkatkan promosi pariwisata melalui internet dengan pengembangan situs web promosi pariwisata tematik, promosi pariwisata berbasis animasi, serta pemanfaatan media sosial yang terkendali;
- h. menerapkan konsep pemasaran bertanggung jawab pada setiap program pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah maupun usaha pariwisata;
- i. membentuk citra pariwisata Kota sebagai destinasi pariwisata pendidikan dan perkotaan berbasis sejarah, alam perkotaan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan melalui perumusan rencana pemasaran pariwisata yang tepat dan efektif;
- j. mengembangkan sistem pemasaran terpadu dengan sektor lain, khususnya perdagangan dan investasi, dengan pariwisata Provinsi Jawa Barat dan Indonesia;
- k. membangun Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota sebagai mitra utama Pemerintah Kota dalam membentuk citra destinasi pariwisata berdaya saing internasional melalui kegiatan promosi.

BAB VIII
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN
Bagian Kesatu
Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata
Pasal 24

Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, meliputi:

- a. pengembangan struktur kelembagaan pemerintahan, struktur organisasi industri pariwisata untuk mendorong perwujudan keterpaduan pembangunan kepariwisataan dan percepatan pembangunan kepariwisataan sebagai sektor unggulan Kota;
- b. pembangunan sistem tata kelola pariwisata terpadu yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal, perlindungan serta peningkatan terhadap kualitas destinasi pariwisata;
- c. pembangunan organisasi tata kelola pariwisata berbasis masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kota, pelaku usaha, akademisi, dan media untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan Kota yang terpadu dan berdaya saing dunia; dan
- d. pembangunan sistem pengembangan masyarakat dan sumber daya manusia guna mewujudkan kelembagaan kepariwisataan Kota yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata
Pasal 25

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan, meliputi:

- a. melakukan transformasi struktur dan sistem kelembagaan Pemerintah Kota di bidang kepariwisataan untuk mewujudkan keterpaduan dan percepatan pembangunan kepariwisataan sebagai sektor unggulan Kota;

- b. membentuk dan membina organisasi pariwisata yang mampu menjalankan program-program transformasi untuk mewujudkan percepatan pembangunan kepariwisataan Kota;
- c. menetapkan dan menerapkan sistem pengelolaan pariwisata terpadu yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal, perlindungan terhadap lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan kualitas destinasi pariwisata;
- d. menyederhanakan prosedur dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam investasi pariwisata dalam mewujudkan kelembagaan investasi yang efektif dan berkinerja tinggi;
- e. mengembangkan mekanisme pemantauan dan pengendalian perkembangan yang berkekuatan hukum pada setiap upaya implementasi perencanaan dan pengelolaan pariwisata;
- f. membentuk dan menetapkan forum tata kelola pariwisata Kota yang mencakup seluruh unsur Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota, pelaku usaha, akademisi, masyarakat, dan media yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan;
- g. mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang efektif dan harmonis dalam menguatkan fungsi dan peran forum tata kelola pariwisata;
- h. mengembangkan program-program sertifikasi bagi sumber daya manusia di bidang perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan Kota;
- i. mengembangkan transformasi pada sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kota untuk melakukan percepatan pembangunan kepariwisataan Kota; dan

- j. mengembangkan mekanisme insentif bagi sumber daya manusia pariwisata yang berkontribusi terhadap percepatan pembangunan kepariwisataan Kota.

BAB IX

INDIKASI PROGRAM

Pasal 26

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Kota dalam kurun waktu tahun 2017-2025 dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai tahapan perencanaan pembangunan Kota.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata menjadi penanggung jawab pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kota.
- (2) Pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan Ripparkot.

- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian Ripparkot bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 30

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabel.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Ripparkot dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Semua perjanjian kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Kota dan/atau dengan pihak lain terkait pembangunan pariwisata di luar perwilayahan pembangunan kawasan pariwisata, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Diundangkan di Depok
pada tanggal 16 Januari 2017
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 16 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

H. HARRY PRIHANTO
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:
(2/2/2017)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK


N. CIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197809271998032004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA DEPOK
TAHUN 2016-2025

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah.

Perkembangan pariwisata Daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota. Lebih lanjut, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kota sesuai dengan tingkatannya.

Ripparkot merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Ripparkot mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa Ripparkot diatur dengan Peraturan Daerah kota untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan Ripparkot.

Pentingnya Ripparkot Daerah sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata Daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat Daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1):

Huruf a:

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf b:

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c:

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d:

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan adalah pembangunan kepariwisataan yang didukung secara ekologis dalam jangka panjang, sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat.

Huruf b

Pembangunan kepariwisataan yang berbudaya adalah pembangunan kepariwisataan yang mampu menciptakan tempat yang lebih baik untuk tinggal/hidup bagi penduduk dan untuk dikunjungi oleh wisatawan.

Huruf c

Keterpaduan dalam pembangunan kepariwisataan, yaitu pembangunan kepariwisataan yang mengutamakan keterpaduan dengan pembangunan wilayah, pembangunan sektor lain, keterpaduan lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemerintahan, komponen-komponen pariwisata, dan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Empat hal penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan prinsip keterpaduan dalam pembangunan kepariwisataan adalah:

- a) kepemimpinan yang berpihak pada kepariwisataan;
- b) komitmen untuk mencapai tujuan bersama;
- c) koordinasi dan komunikasi yang intensif dan efektif;
- d) pemantauan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang konsisten dan tegas.

Huruf d

Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat, yaitu pembangunan kepariwisataan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata di lingkungannya. Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat merupakan pembangunan kepariwisataan yang *pro-poor, pro-job, pro-growth, pro environment*. Hal penting yang harus diperhatikan dalam penerapan prinsip pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat adalah:

- a) mendorong kepemilikan lokal dalam pariwisata;
- b) melibatkan anggota masyarakat dari mulai tahap awal pengembangan;
- c) mendorong kebanggaan masyarakat;
- d) meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- e) menjamin keberlanjutan lingkungan;
- f) melestarikan keunikan karakter dan budaya lokal;
- g) mendorong pembelajaran lintas budaya;
- h) menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia;
- i) mendistribusikan manfaat secara adil kepada masyarakat luas;
- j) berkontribusi terhadap program-program kemasyarakatan.

Huruf e

Pembangunan kepariwisataan beridentitas lokal yaitu pembangunan kepariwisataan yang menerapkan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk norma-norma sosial dan budaya yang dianut masyarakat. Identitas lokal bagi Kota Depok adalah wilayah dengan banyak situ, sejarah Belanda Depok, dan Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia.

Pembangunan kepariwisataan berwawasan global yaitu pembangunan kepariwisataan yang mampu melakukan perubahan dan inovasi sesuai perkembangan dunia dan permintaan pasar.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Kemitraan berkinerja tinggi adalah kemitraan yang dilandasi oleh sikap saling terbuka dan percaya, menerapkan prinsip keselarasan dalam pelaksanaannya, memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan bersama, mampu mengelola perbedaan perspektif dan program-program pengembangan, memberikan nilai tambah bagi mitra-mitra yang terlibat maupun bagi hubungan kemitraan yang dibangun, serta berjangka panjang.

Huruf f

Industri pariwisata berkredibilitas tinggi adalah industri pariwisata yang dari sisi kualitas dan kapabilitas telah mendapatkan kepercayaan yang kuat dari wisatawan maupun mitra usahanya.

Huruf g

Sistem pemasaran pariwisata kreatif adalah pemasaran pariwisata yang menggunakan gagasan kreatif dan memanfaatkan sektor ekonomi kreatif dalam menjangkau wisatawan yang lebih berkualitas dengan lebih efektif.

Huruf h

Pemasaran pariwisata terpadu dan bertanggung jawab adalah pemasaran pariwisata yang bertujuan:

- a) memadukan berbagai upaya pemasaran pariwisata yang dilakukan oleh usaha pariwisata dan pemerintah;
- b) mengembangkan produk yang menyeimbangkan kebutuhan konsumen akan kualitas, harga yang terjangkau, dan kenyamanan dengan perlindungan sumber daya lingkungan, sosial, dan budaya; dan
- c) membangun citra destinasi berkualitas tinggi, yang juga meliputi sensitivitas terhadap lingkungan dan rekam jejak pemeliharaan lingkungan untuk produk pariwisata yang dikembangkan suatu destinasi.

Huruf i

Tata kelola pariwisata adalah sistem pengelolaan pariwisata yang terstruktur dan sinergis yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik.

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pusat pelayanan primer adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata skala nasional dan internasional yang berfungsi sebagai pusat pelayanan utama dan titik simpul awal penyebaran wisatawan ke seluruh wilayah di Daerah.

Pusat pelayanan sekunder adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata skala nasional dan lokal sesuai dengan karakteristik wilayahnya yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata untuk wilayah tertentu di Daerah dan menjadi pusat pertumbuhan wilayahnya.

Huruf c

Jalur wisata tematik adalah jalur pariwisata yang menghubungkan daya tarik wisata yang memiliki keterkaitan tema tertentu, didukung oleh fasilitas pariwisata dan fasilitas umum, dengan faktor pengikatnya adalah tema, jalur transportasi darat, laut, dan udara, serta sistem informasi yang seluruh komponen tersebut saling terkait dalam membangun sebuah tema produk pariwisata.

Huruf d

Wisata kreatif adalah wisata yang memberikan pengalaman dan peluang kepada wisatawan untuk mengembangkan potensi kreatifnya. Potensi kreatif wisatawan tersebut dimunculkan melalui partisipasi aktif dalam program dan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik destinasi yang dikunjunginya.

Wisata edukatif adalah wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, mengandung banyak muatan pendidikan dan pengetahuan bagi pengembangan diri wisatawan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Wisata berwawasan lingkungan adalah kegiatan wisata yang mendorong wisatawan untuk mengapresiasi sumber daya alam dan lingkungan di destinasi pariwisata, meningkatkan kesadaran untuk melestarikan lingkungan, dan berkontribusi terhadap upaya perlindungan sumber daya alam dan budaya.

Huruf h

Interpretasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengungkap makna dan hubungan lewat penggunaan objek asli, melalui pengalaman langsung dan media yang ilustratif dengan menyertakan manusia bersama objek. Teknik interpretasi terdiri dari: mengajukan pertanyaan, bercerita, bayangan/gambaran yang dipandu, penggunaan humor, tayangan, teka-teki, alat bantu boneka, dan simulasi/permainan.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas

Huruf t

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Tema utama adalah jenis pariwisata yang akan menjadi fokus utama pembangunan kepariwisataan kawasan.

Huruf b

Tema pendukung adalah jenis pariwisata khas kawasan yang potensial untuk dikembangkan dan mendukung tema pengembangan primer.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Rantai nilai industri pariwisata adalah kumpulan kegiatan usaha pariwisata yang dilakukan untuk merancang, memproduksi, memasarkan, menyajikan, dan mendukung pengembangan produk pariwisata. Rantai nilai terdiri dari sekumpulan kegiatan utama dan pendukung. Kegiatan utama terdiri dari logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran, penjualan, dan pelayanan. Kegiatan pendukung terdiri dari infrastruktur perusahaan, pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan teknologi dan usaha.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri yang berkedudukan di kabupaten/kota. Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Unsur penentu kebijakan berjumlah 9 (sembilan) orang anggota, terdiri atas:

- a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
- b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
- c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang;
- d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.

Unsur penentu kebijakan membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota. Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan. Unsur pelaksana wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.

Ketentuan mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota diatur dengan Peraturan Wali Kota. Ketentuan mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota.

Masa kerja unsur penentu kebijakan paling lama 4 (empat) tahun, masa kerja unsur pelaksana paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota mempunyai tugas:

- a. meningkatkan citra kepariwisataan Kota;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;

- c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjannya;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota mempunyai fungsi:

- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan oleh dunia usaha di daerah; dan
- b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota berasal dari:

- a. pemangku kepentingan; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Transformasi struktur organisasi adalah perubahan yang inovatif dan fundamental terhadap pola hubungan fungsi-fungsi dalam organisasi Pemerintah Kota di bidang kepariwisataan untuk mewujudkan transformasi kepariwisataan.

Transformasi sistem organisasi adalah perubahan yang inovatif dan fundamental terhadap mekanisme komunikasi, koordinasi, serta pengendalian program dan kinerja organisasi Pemerintah Kota di bidang kepariwisataan mewujudkan transformasi kepariwisataan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Transformasi sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kota adalah perubahan yang inovatif dan fundamental terhadap kepemimpinan, kapasitas, kapabilitas, serta mekanisme penempatan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kota untuk mendukung terwujudnya transformasi kepariwisataan.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Peninjauan kembali Ripparkot, dilaksanakan:

- a. guna mendapat bahan masukan sebagai penyempurnaan Ripparkot selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang;
- b. jika terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 8

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA
DEPOK TAHUN 2017-2025**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN.
2. LAMPIRAN II : PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KOTA
DAN PETA KAWASAN PENGEMBANGAN
PARIWISATA KOTA.
3. LAMPIRAN III : RINCIAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KOTA.

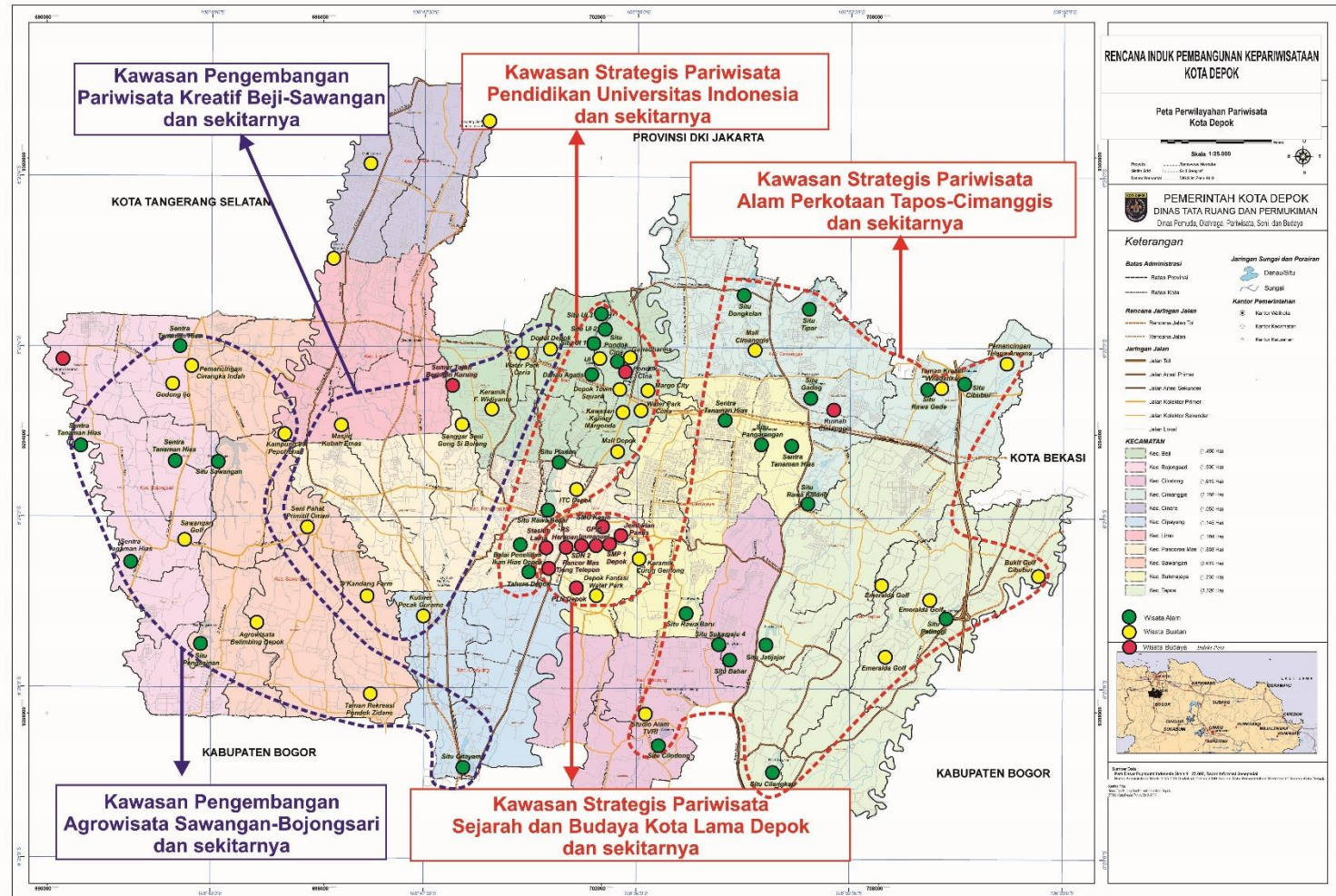
**WALI KOTA DEPOK,
TTD**

K.H. MOHAMMAD IDRIS

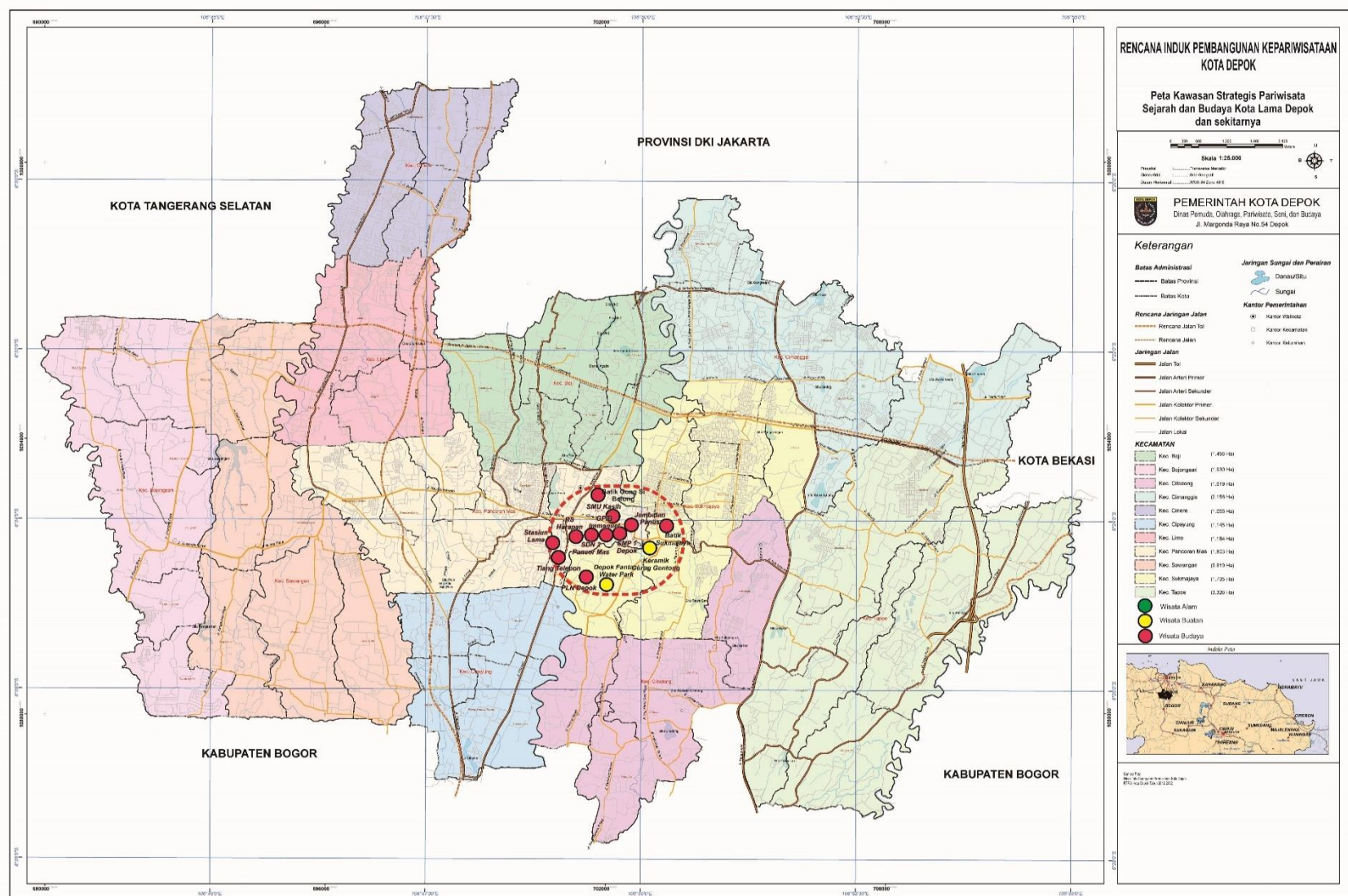
LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 8 TAHUN 2017

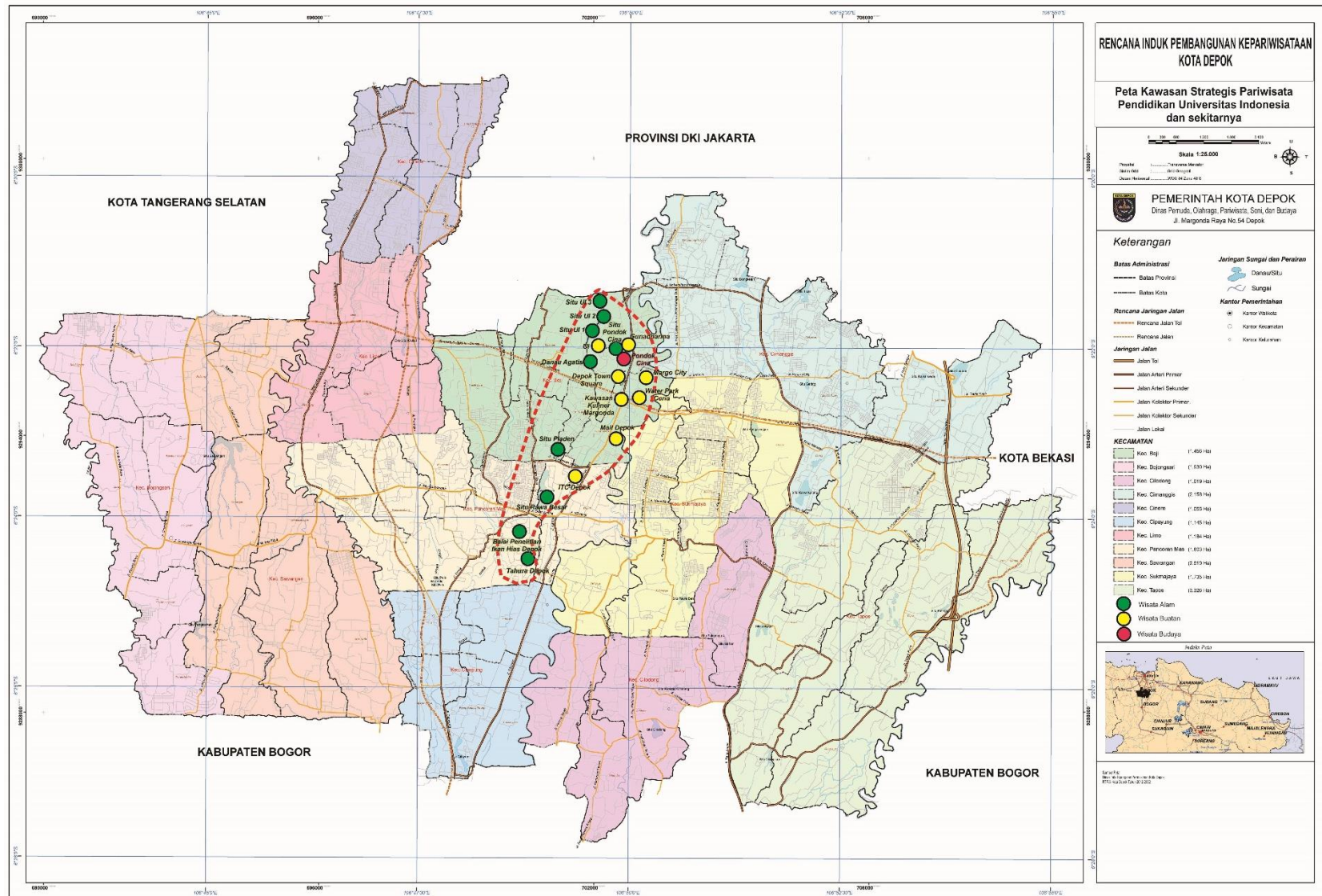
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA DEPOK TAHUN 2017-2025



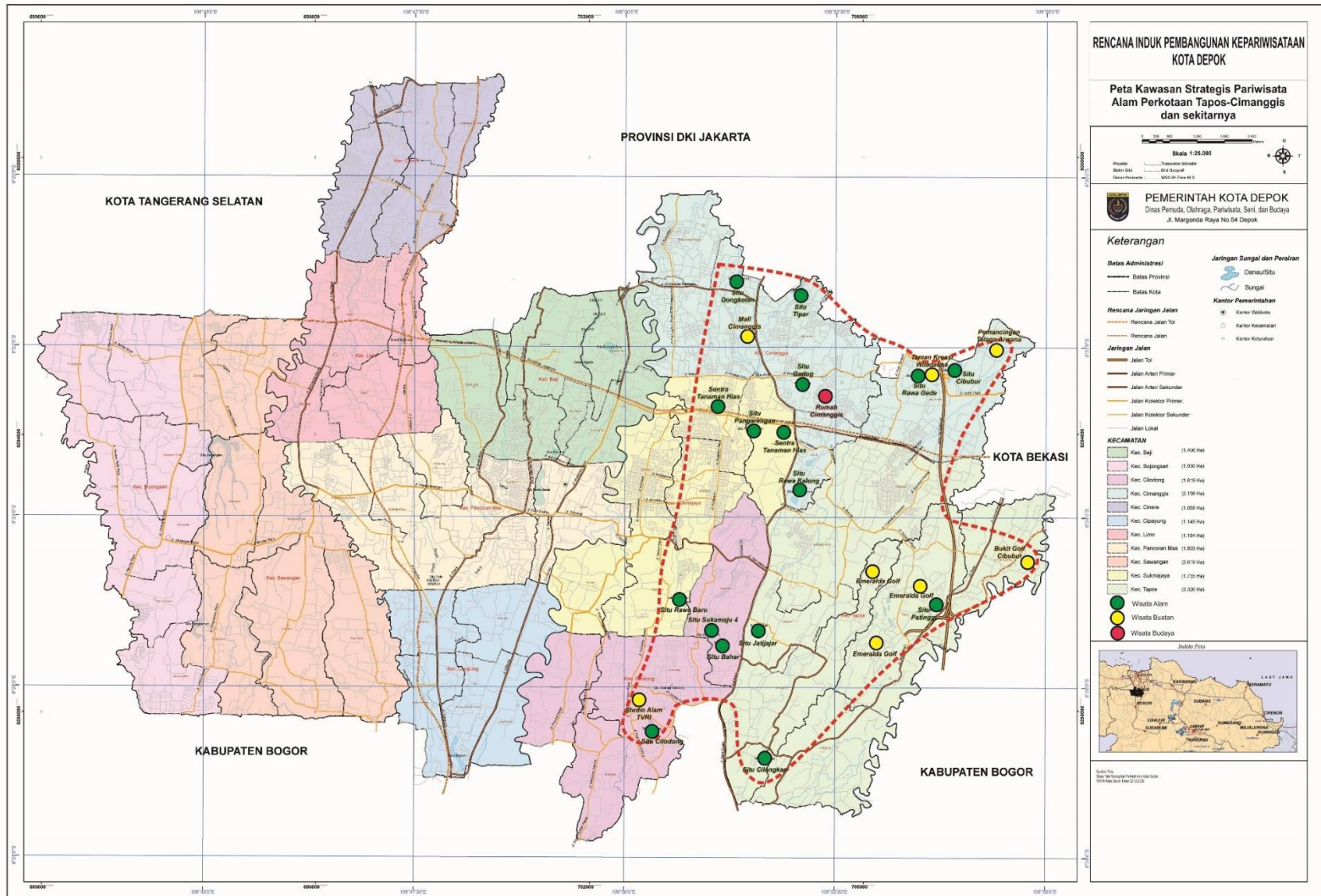
I. PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA SEJARAH DAN BUDAYA KOTA LAMA DEPOK DAN SEKITARNYA



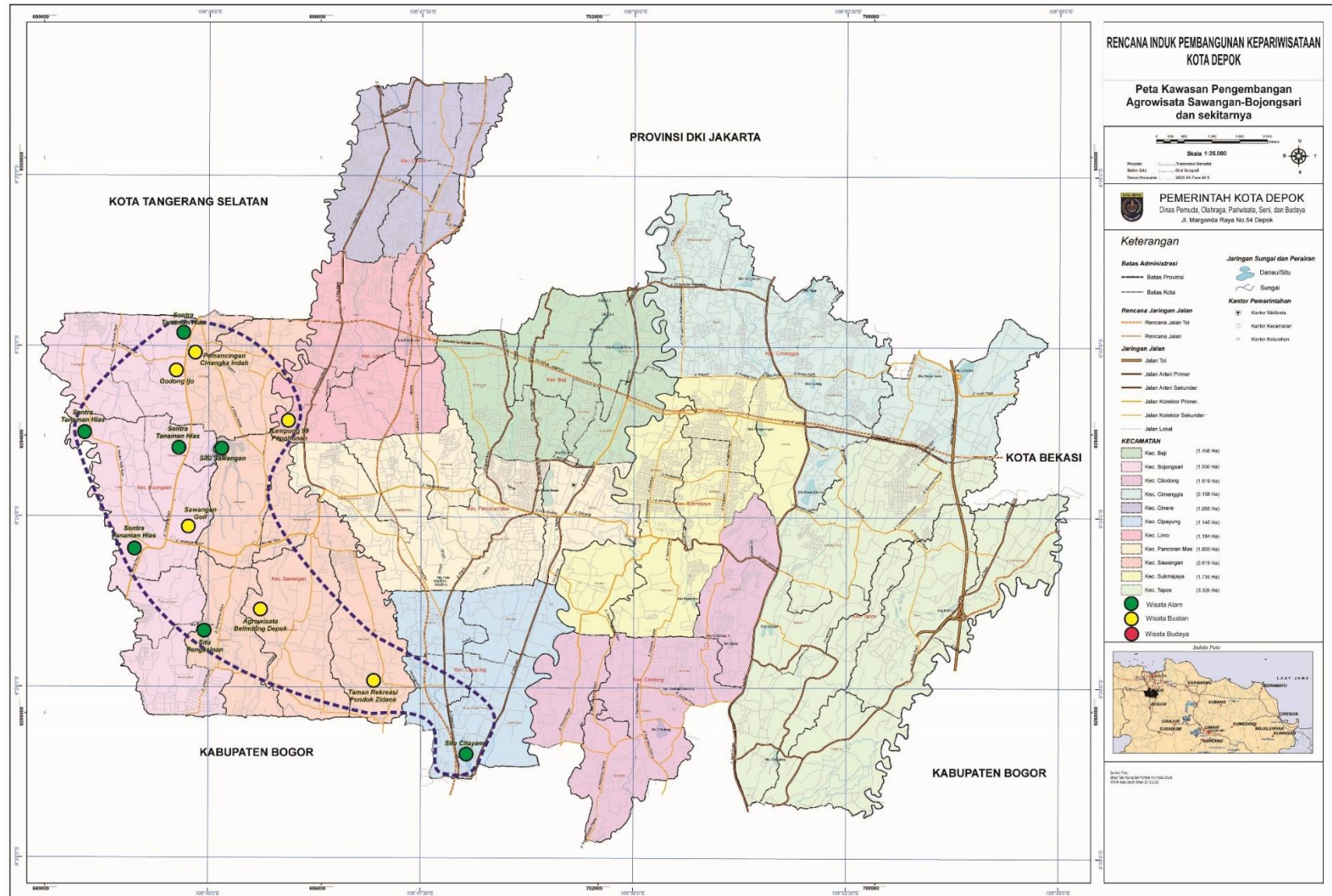
II. PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PENDIDIKAN UNIVERSITAS INDONESIA DAN SEKITARNYA



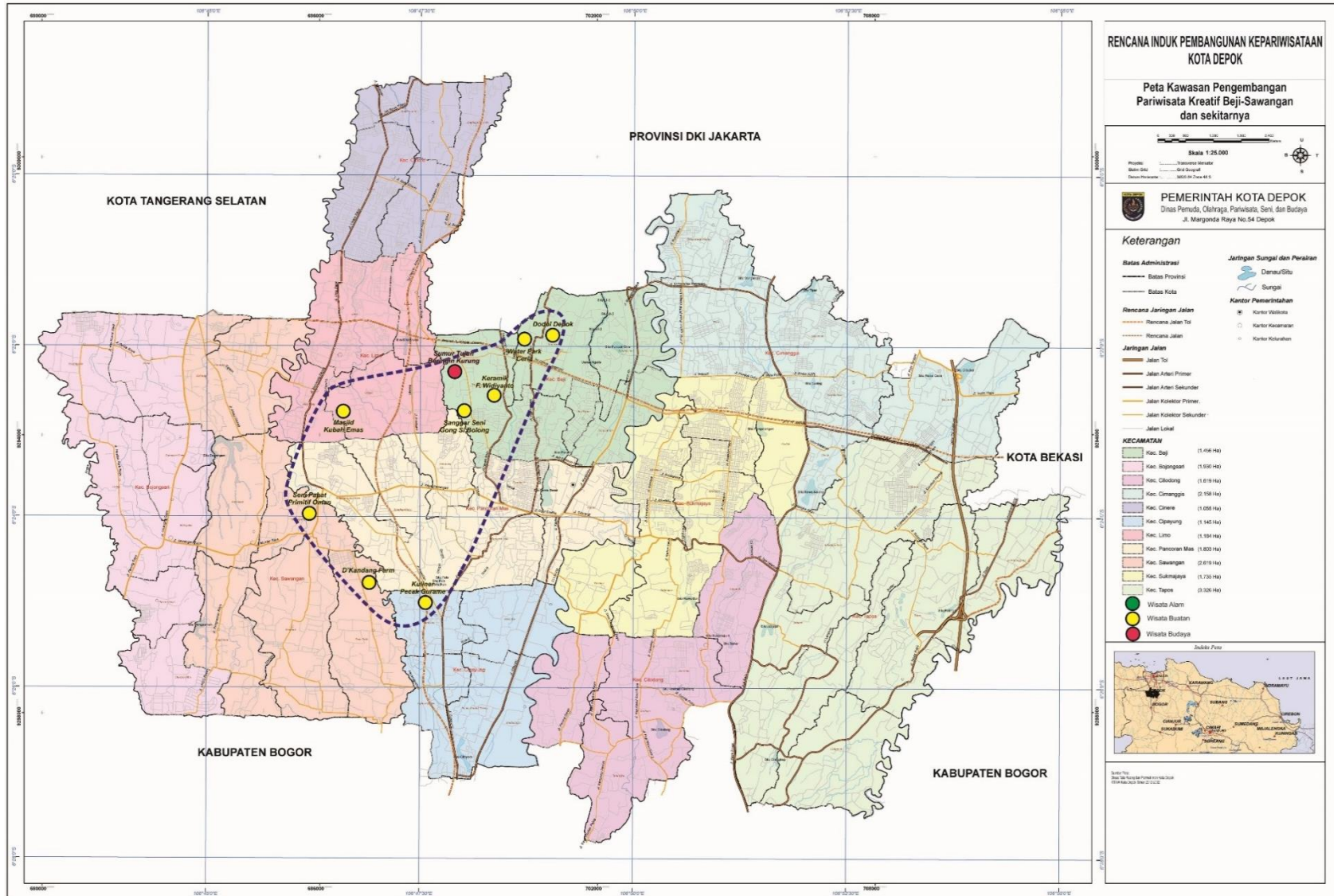
III. PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA ALAM PERKOTAAN TAPOS-CIMANGGIS DAN SEKITARNYA



IV. PETA KAWASAN PENGEMBANGAN AGROWISATA SAWANGAN - BOJONGSARI DAN SEKITARNYA



V. PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KREATIF BEJI - SAWANGAN DAN SEKITARNYA



LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA DEPOK TAHUN 2017-2025

TABEL I. PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
1. Membangun Kawasan Pariwisata Kota, meliputi Kawasan Strategis Pariwisata Sejarah dan Budaya Kota Lama Depok dan sekitarnya, Kawasan Strategis Pariwisata Pendidikan Universitas Indonesia dan sekitarnya, Kawasan Strategis Pariwisata Alam Perkotaan Tapos-Cimanggis, Kawasan Pengembangan Agrowisata Sawangan-Bojongsari, dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kreatif Beji-Sawangan dan sekitarnya.	Program perwilayahan pariwisata	Sosialisasi Ripparkot, Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) Depok dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota (KPPK) Depok										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan - Asosiasi usaha pariwisata Daerah - Asosiasi profesi pariwisata Daerah - Perguruan tinggi kepariwisataan 	
	Program perwilayahan pariwisata	Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detil KSPK										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan - Perangkat daerah kota bidang tata ruang 	
	Program perwilayahan pariwisata	Penetapan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk dan Rencana Detil KSPK											Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian hukum Sekretariat Daerah - Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan - Perangkat daerah kota bidang tata ruang
	Program perwilayahan pariwisata	Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detil KPPK											Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan - Perangkat daerah kota bidang tata ruang
	Program perwilayahan pariwisata	Penetapan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk dan Rencana Detil KPPK											Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian hukum Sekretariat Daerah - Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan - Perangkat daerah kota bidang tata ruang
	Program perwilayahan	Sosialisasi Peraturan Walikota											Perangkat daerah kota bidang	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	pariwisata	tentang Rencana Induk dan Rencana Detil KSPK dan KPPK Depok.										kepariwisataan	- Perangkat daerah kota bidang tata ruang
2. Menetapkan dan mengembangkan Pancoran Mas sebagai pusat pelayanan primer pariwisata Kota, serta Tapos dan Sawangan sebagai pusat pelayanan sekunder pariwisata Kota.	Program perwilayahan pariwisata	Sosialisasi Pancoran Mas sebagai pusat pelayanan primer pariwisata Daerah, serta Tapos dan Sawangan sebagai pusat pelayanan sekunder pariwisata Daerah;										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	- Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan - Perangkat daerah kota bidang tata ruang
	Program perwilayahan pariwisata	Sinkronisasi peraturan pembangunan dan pengelolaan pusat pelayanan pariwisata primer dan sekunder dengan RDTR										Perangkat daerah kota bidang tata ruang	Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan
	Program perwilayahan pariwisata	Pembangunan dan penyusunan rencana pengelolaan pusat informasi pariwisata di Pancoran Mas, Tapos, dan Sawangan.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	- Perangkat daerah kota bidang pekerjaan umum - Perangkat daerah kota bidang komunikasi dan informasi
	Program pembangunan fasilitas pariwisata.	Pengembangan kerja sama pengelolaan pusat informasi pariwisata.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	- Perangkat daerah kota bidang pekerjaan umum - Perangkat daerah kota bidang komunikasi dan informasi
	Program perwilayahan pariwisata	Evaluasi kinerja pusat pelayanan primer dan sekunder.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	- Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan - Perangkat daerah kota bidang tata ruang

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
													<ul style="list-style-type: none"> Perangkat daerah kota bidang pekerjaan umum 	
	Program pembangunan fasilitas pariwisata.	Evaluasi kinerja pusat informasi pariwisata.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> Asosiasi usaha pariwisata Perguruan tinggi kepariwisataan 	
3. Mengembangkan jalur-jalur wisata tematik alam, sejarah dan budaya, kuliner, pendidikan, seni dan budaya, pariwisata kreatif, agrowisata, dan tema-tema lain yang khas dan berdaya saing, yang menghubungkan kawasan-kawasan pariwisata Kota dengan kawasan pariwisata di sekitarnya.	Program pengembangan daya tarik wisata	Penyusunan rencana pengembangan jalur wisata tematik alam, sejarah dan heritage, kuliner, pendidikan, seni dan budaya, pariwisata kreatif, agrowisata dan tema-tema lain.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> Asosiasi usaha perjalanan wisata Perguruan tinggi kepariwisataan 	
	Program pengembangan daya tarik wisata	Perencanaan interpretasi jalur wisata tematik alam, sejarah dan heritage, kuliner, pendidikan, seni dan budaya, pariwisata kreatif, agrowisata dan tema-tema lain.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> Asosiasi usaha perjalanan wisata Daerah Asosiasi pramuwisata Daerah Perguruan tinggi kepariwisataan 	
	Program pengembangan daya tarik wisata	Sosialisasi jalur wisata kepada pelaku usaha pariwisata (usaha perjalanan wisata dan usaha jasa pramuwisata), pelaku usaha terkait, pemerintah, dan masyarakat.											Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> Asosiasi usaha perjalanan wisata Daerah Asosiasi pramuwisata Daerah Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan fasilitas pariwisata	Pembangunan fasilitas interpretasi dan infrastruktur pendukung tema											<ul style="list-style-type: none"> Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan 	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat daerah kota bidang pekerjaan umum Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
		jalur wisata.										- Pengelola daya tarik wisata	perhubungan	
	Program pengembangan daya tarik wisata	Fasilitasi pengembangan kemitraan penyelenggaraan paket wisata.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	Asosiasi usaha perjalanan wisata kota	
4. Mengembangkan program-program wisata kreatif, edukatif, dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan lingkungan lama tinggal, pengeluaran wisatawan, dan jumlah kunjungan wisatawan.	Program pengembangan daya tarik wisata	Penyusunan dan penetapan pedoman pengembangan pariwisata kreatif Daerah.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	- Asosiasi usaha daya tarik wisata kota - Perguruan tinggi kepariwisataan	
	Program pengembangan daya tarik wisata	Penyusunan dan penetapan pedoman pengembangan pariwisata pendidikan Daerah.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	- Asosiasi usaha daya tarik wisata kota - Perguruan tinggi kepariwisataan	
	Program pengembangan daya tarik wisata	Penyusunan dan penetapan pedoman pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan Daerah.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	- Asosiasi usaha daya tarik wisata kota - Perguruan tinggi kepariwisataan	
	Program pengembangan daya tarik wisata	Penilaian daya tarik wisata kreatif, edukatif, dan berwawasan lingkungan Kota Depok.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	- Asosiasi usaha daya tarik wisata kota - Perguruan tinggi kepariwisataan	
	Program pengembangan daya tarik wisata	Penyusunan profil daya tarik wisata kreatif, edukatif, dan berwawasan lingkungan.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	- Asosiasi usaha daya tarik wisata kota - Perguruan tinggi kepariwisataan	
	Program pengembangan daya tarik wisata	Pemberian penghargaan untuk daya tarik wisata kreatif, edukatif, dan berwawasan lingkungan yang											Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	Asosiasi usaha daya tarik wisata kota

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
		berkinerja tinggi.											
	Program pengembangan daya tarik wisata	Fasilitasi kerja sama pengelola daya tarik wisata dengan biro perjalanan wisata di Kota Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Bali, dengan sekolah-sekolah, dan destinasi utama pariwisata nasional.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	Asosiasi usaha daya tarik wisata kota
5. Mengembangkan program-program wisata kreatif pada daya tarik wisata seni dan budaya tradisional, industri kreatif, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.	Program pengembangan daya tarik wisata	Pelatihan dan pendampingan pengembangan produk pariwisata kreatif bagi pengelola sanggar seni, pengelola industri kreatif, dan pengelola daya tarik wisata.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang industri kreatif - Perangkat daerah kota bidang usaha mikro - Asosiasi usaha daya tarik wisata kota - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan daya tarik wisata	Penyusunan dan penyepakatan mekanisme pengelolaan produk pariwisata kreatif di daya tarik wisata seni dan budaya tradisional, industri kreatif, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang industri kreatif - Perangkat daerah kota bidang usaha mikro - Asosiasi usaha daya tarik wisata kota - Perguruan tinggi kepariwisataan

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
6. Mengembangkan program-program wisata edukatif pada daya tarik sejarah, bangunan bersejarah atau warisan budaya, dan wisata alam perkotaan yang mampu meningkatkan kontribusi wisatawan dan penduduk terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota.	Program pengembangan daya tarik wisata	Pelatihan dan pendampingan pengembangan produk pariwisata edukatif bagi pengelola daya tarik wisata sejarah, bangunan <i>heritage</i> , dan alam perkotaan.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang pendidikan - Perangkat daerah kota bidang kebudayaan - Asosiasi usaha daya tarik wisata kota - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan daya tarik wisata	Penyusunan dan penyepakatan mekanisme pengelolaan produk pariwisata edukatif di daya tarik wisata sejarah, bangunan <i>heritage</i> , dan alam perkotaan.											Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan
7. Membangun program-program wisata berwawasan lingkungan pada hutan-hutan kota dan situ-situ sebagai daya tarik wisata tematik berbasis sejarah dan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Program pengembangan daya tarik wisata	Fasilitasi kerja sama pengelolaan hutan kota dan situ sebagai daya tarik wisata alam perkotaan unggulan.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang pekerjaan umum - Perangkat daerah kota bidang lingkungan hidup - Perangkat daerah kota bidang kehutanan
	Program pengembangan daya tarik wisata	Pelatihan dan pendampingan pengembangan produk pariwisata berwawasan lingkungan bagi pengelola hutan kota dan situ.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang pekerjaan umum - Perangkat daerah kota bidang lingkungan hidup - Perangkat daerah kota bidang kehutanan - Asosiasi usaha daya tarik wisata kota - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan	Penyusunan dan penyepakatan											Perangkat daerah kota bidang

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	daya tarik wisata	mekanisme pengelolaan produk pariwisata berwawasan lingkungan.										kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang lingkungan hidup - Perangkat daerah kota bidang kehutanan - Asosiasi usaha daya tarik wisata kota - Perguruan tinggi kepariwisataan
8. Merencanakan interpretasi yang sesuai dengan karakteristik setiap daya tarik wisata Kota dan target pasar wisatawan.	Program pengembangan daya tarik wisata	Workshop penyusunan rencana interpretasi untuk daya tarik wisata primer di KSPK dan KPPK.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola daya tarik wisata - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan fasilitas pariwisata	Pembangunan papan interpretasi di daya tarik wisata primer di KSPK dan KPPK.										Pengelola daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan daya tarik wisata	Penyusunan brosur/leaflet interpretasi daya tarik wisata primer di KSPK dan KPPK.										Pengelola daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan daya tarik wisata	Pelatihan interpretasi bagi mahasiswa dan pemandu wisata.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola daya tarik wisata - Asosiasi pramuwisata kota - Perguruan tinggi kepariwisataan
9. Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan, kualitas fisik dan	Program pembangunan aksesibilitas	Perbaikan dan pelebaran jalan menuju daya tarik wisata.										Perangkat daerah kota bidang pekerjaan umum	Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
pelayanan transportasi umum berbasis pariwisata dan ramah lingkungan, serta pengelolaan lalu lintas terpadu dan efektif yang menghubungkan seluruh daya tarik wisata di Kota.													
	Program pembangunan aksesibilitas	Penyediaan transportasi umum yang nyaman dan berbahan bakar ramah lingkungan menuju daya tarik wisata.										Perangkat daerah kota bidang perhubungan	Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan
	Program pembangunan aksesibilitas	Penyediaan angkutan wisata di daya tarik wisata tertentu dan untuk tur keliling kota.										Perangkat daerah kota bidang perhubungan	Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan
	Program pembangunan aksesibilitas	Penyediaan papan petunjuk arah ke seluruh daya tarik wisata dan papan informasi pariwisata di jalan-jalan utama menuju daya tarik wisata, di pusat pelayanan primer dan sekunder, serta di pusat-pusat kegiatan wisata.										Perangkat daerah kota bidang perhubungan	Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan
10. Mengembangkan aksesibilitas terpadu, ramah	Program pembangunan aksesibilitas	Penyediaan bis yang nyaman, dengan pelayanan										Perangkat daerah provinsi bidang perhubungan	- Perangkat daerah kota bidang perhubungan - Perangkat daerah kota bidang

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
lingkungan, dan berstandar internasional dari pintu masuk Indonesia dan destinasi pariwisata unggulan nasional.		berstandar internasional dari Bandara Soekarno Hatta, Stasiun Kereta Api Gambir, Tanjung Priok, pusat kota dan kegiatan wisata di Jakarta, Kepulauan Seribu, Bogor, Bandung, Cirebon, dan destinasi lain unggulan nasional,											kepariwisataan
	Program pembangunan aksesibilitas	Penyediaan kereta api yang nyaman, dengan pelayanan berstandar internasional dari Bandara Soekarno Hatta, Stasiun Kereta Api Gambir, Tanjung Priok, Bogor, Bandung, Cirebon, Yogyakarta, dan destinasi lain unggulan nasional,										Perangkat daerah provinsi bidang perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang perhubungan - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan
	Program pembangunan aksesibilitas	Penyediaan informasi pariwisata Kota Depok di bandara internasional,											Perangkat daerah provinsi bidang perhubungan

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
		stasiun kereta api, pelabuhan pariwisata/ marina, dan daya tarik wisata unggulan di Jakarta, Kepulauan Seribu, Bandung, Bogor, Cirebon, dan destinasi lain unggulan nasional.											
11. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana umum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan sebagai destinasi pariwisata berdaya saing internasional.	Program pembangunan prasarana umum	Penyediaan jaringan dan sistem penyediaan air bersih yang ramah lingkungan dan menghasilkan air bersih sesuai target wisatawan dan proyeksi penduduk di pusat primer dan sekunder pariwisata Daerah.										Perangkat daerah kota bidang pekerjaan umum	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan daerah untuk penyediaan air minum - Kecamatan
	Program pembangunan prasarana umum	Penyediaan jaringan dan sistem pembuangan yang ramah lingkungan di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Daerah.										Perangkat daerah kota bidang pekerjaan umum	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang lingkungan hidup - Kecamatan
	Program pembangunan prasarana umum	Penyediaan sistem dan pengolahan sampah zero waste yang ramah lingkungan di daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, pusat pelayanan											Perangkat daerah kota bidang pekerjaan umum

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
		primer dan sekunder pariwisata Daerah.											
	Program pembangunan prasarana umum	Penerapan ketentuan hemat energi di daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan transportasi wisata.										Perangkat daerah kota bidang pekerjaan umum	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang keenergian - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Kecamatan
12. Mengembangkan pusat informasi pariwisata, fasilitas akomodasi kelas bintang, daya tarik wisata, fasilitas rekreasi berstandar internasional dan berwawasan lingkungan di pusat pelayanan primer dan sekunder pariwisata Kota.	Program pembangunan fasilitas pariwisata	Pembangunan pusat informasi pariwisata berstandar internasional dan berwawasan lingkungan dengan ciri khas bangunan Sunda dan Betawi di pusat pelayanan primer dan sekunder										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang lingkungan hidup - Perangkat daerah kota pekerjaan umum
	Program pembangunan fasilitas pariwisata	Penerapan persyaratan ramah lingkungan bagi fasilitas akomodasi kelas bintang 4-5 di pusat pelayanan primer dan sekunder.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	Perangkat daerah kota bidang lingkungan hidup
	Program pembangunan fasilitas pariwisata	Fasilitasi penerapan standar internasional dan ramah lingkungan bagi fasilitas akomodasi kelas bintang 1-3, daya										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	Perangkat daerah kota bidang lingkungan hidup

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
		tarik wisata, dan fasilitas rekreasi di pusat pelayanan primer dan sekunder.												
13. Mengembangkan fasilitas pariwisata berbasis masyarakat dan pelayanan pariwisata yang menerapkan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Kota.	Program pembangunan fasilitas pariwisata	Pelatihan dan pendampingan penerapan standar homestay/pondok wisata masyarakat di sekitar daya tarik wisata.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan - Kelurahan - Perguruan tinggi kepariwisataan 	
	Program pembangunan fasilitas pariwisata	Pelatihan dan pendampingan penerapan standar nasional bagi fasilitas kuliner yang dikelola masyarakat di sekitar daya tarik wisata.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang usaha mikro - Perangkat daerah provinsi bidang usaha kecil dan menengah - Kecamatan - Kelurahan - Perguruan tinggi tata boga 	
	Program pembangunan fasilitas pariwisata	Penyediaan angkutan wisata oleh masyarakat di dalam KSPP dan KPPP.											Perangkat daerah kota bidang perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Kecamatan - Kelurahan
	Program pembangunan fasilitas pariwisata	Penyediaan pusat informasi pariwisata di kelurahan yang menjadi konsentrasi kegiatan wisata.											Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan - Kelurahan - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pembangunan fasilitas pariwisata	Pelatihan dan pendampingan penerapan nilai-nilai kearifan lokal pada pelayanan homestay/ pondok wisata, fasilitas											Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kebudayaan - Perguruan tinggi kepariwisataan

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
		kuliner masyarakat, dan transportasi wisata masyarakat.											
	Program pembangunan fasilitas pariwisata	Pemberian penghargaan kepada homestay/pondok wisata, fasilitas kuliner masyarakat, dan transportasi wisata masyarakat yang sudah menerapkan standar dan nilai-nilai kearifan lokal.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kebudayaan - Perangkat daerah kota bidang usaha mikro - Perangkat daerah provinsi bidang usaha kecil dan menengah - Kecamatan - Kelurahan - Perguruan tinggi tata boga
14. Membangun infrastruktur, muka bangunan, dan suasana fasilitas pariwisata dan fasilitas umum yang mencirikan budaya Sunda dan Betawi.	Program pembangunan daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata	Penyusunan standar pedoman pembangunan infrastruktur, muka bangunan, dan suasana Sunda dan Betawi pada bangunan di daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata.										Perangkat daerah kota bidang pekerjaan umum	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kebudayaan - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Perguruan tinggi bidang arsitektur
	Program pembangunan daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata	Pemantauan dan evaluasi penerapan standar dan pedoman pembangunan berciri khas Sunda dan Betawi.										Perangkat daerah kota bidang pekerjaan umum	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kebudayaan - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Perguruan tinggi bidang arsitektur
	Program pembangunan daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata	Pemberian penghargaan kepada daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata dengan bangunan dan suasana yang mencirikan Sunda dan Betawi.											Perangkat daerah kota bidang pekerjaan umum

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
15. Mengembangkan mekanisme komunikasi yang efektif kepada masyarakat dengan memanfaatkan media dan teknologi informasi untuk meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pariwisata.	Program peningkatan kesadaran wisata masyarakat	Penyediaan informasi perkembangan pariwisata Daerah kepada masyarakat melalui aplikasi di telepon selular.										Perangkat daerah kota bidang komunikasi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Perguruan tinggi bidang telekomunikasi dan atau informatika
	Program peningkatan kesadaran wisata masyarakat	Penyediaan informasi perkembangan pariwisata Daerah kepada masyarakat melalui aplikasi internet yang menjadi minat anak muda.										Perangkat daerah kota bidang komunikasi dan informasi	Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan
	Program peningkatan kesadaran wisata masyarakat	Penyediaan informasi perkembangan pariwisata Daerah kepada masyarakat melalui televisi, radio, dan media massa online.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Media massa nasional online - Radio nasional - Televisi nasional
			Pemutakhiran data dan pemeliharaan aplikasi berbasis online.										Perangkat daerah kota bidang komunikasi dan informasi
16. Membentuk dan mengembangkan kelompok penggerak pariwisata di seluruh kecamatan yang terdiri dari perwakilan seluruh kelompok masyarakat.	Program pemberdayaan masyarakat	Fasilitasi pembentukan dan penetapan kelompok penggerak pariwisata di seluruh kecamatan.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan - Kelurahan - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pemberdayaan masyarakat	Pelatihan dan pendampingan manajemen										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Kecamatan - Kelurahan

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
		organisasi kepada kelompok penggerak pariwisata.											- Perguruan tinggi manajemen organisasi
	Program pemberdayaan masyarakat	Pemberian penghargaan kepada kelompok penggerak pariwisata yang berkinerja baik dan inovatif										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	- Kecamatan - Kelurahan - Perguruan tinggi kepariwisataan
17. Mengembangkan pembinaan yang berkelanjutan terhadap kelompok penggerak pariwisata dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan berdaya saing internasional.	Program pemberdayaan masyarakat	Pelatihan dan pendampingan pengembangan produk pariwisata kepada kelompok penggerak pariwisata.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	- Kecamatan - Kelurahan - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pemberdayaan masyarakat	Pelatihan dan pendampingan pengelolaan pariwisata kepada kelompok penggerak pariwisata.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	- Kecamatan - Kelurahan - Perguruan tinggi kepariwisataan
18. Menetapkan dan menerapkan standar dan pedoman bagi investasi pariwisata berbasis masyarakat dan sumber daya lokal di Kota.	Program pengembangan investasi pariwisata	Penyusunan dan penetapan standar dan pedoman investasi berbasis masyarakat dan sumber daya lokal.										Perangkat daerah kota bidang penanaman modal	Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan
	Program pengembangan investasi pariwisata	Sosialisasi standar dan pedoman investasi berbasis masyarakat dan sumber daya lokal.										Perangkat daerah kota bidang penanaman modal	Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	Program pengembangan investasi pariwisata	Pendampingan penerapan standar dan pedoman investasi berbasis masyarakat dan sumber daya lokal.										Perangkat daerah kota bidang penanaman modal	Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan
19. Mengembangkan sistem informasi bagi investasi pariwisata berbasis masyarakat dan sumber daya lokal di Kota.	Program pengembangan investasi pariwisata	Pembuatan situs web bagi investasi pariwisata berbasis masyarakat dan sumber daya lokal.										Perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi	- Perangkat daerah bidang penanaman modal - Perangkat daerah bidang kepariwisataan
	Program pengembangan investasi pariwisata	Pemutakhiran dan pengelolaan situs web investasi pariwisata berbasis masyarakat dan sumber daya lokal.										Perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi	- Perangkat daerah bidang penanaman modal - Perangkat daerah bidang kepariwisataan
20. Mengembangkan mekanisme insentif bagi investasi pariwisata yang berbasis masyarakat dan sumber daya lokal.	Program pengembangan investasi pariwisata	Pemantauan dan evaluasi penerapan standar investasi berbasis masyarakat dan sumber daya lokal.										Perangkat daerah kota bidang penanaman modal	Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan
	Program pengembangan investasi pariwisata	Penyusunan dan penetapan insentif bagi investasi pariwisata berbasis masyarakat dan sumber daya lokal.										Perangkat daerah kota bidang penanaman modal	Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan
	Program pengembangan investasi pariwisata	Pemberian penghargaan kepada investasi pariwisata berbasis masyarakat dan sumber daya lokal.										Perangkat daerah kota bidang penanaman modal	Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan

TABEL II. PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
1. Mengembangkan identitas usaha pariwisata Kota yang kreatif melalui penciptaan suasana khas Sunda dan Betawi serta pelayanan kreatif kepada konsumen.	Program peningkatan daya saing produk	Sosialisasi standar dan pedoman penerapan nilai-nilai khas Sunda dan Betawi dalam memberikan pelayanan yang kreatif kepada konsumen.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang perindustrian - Perangkat daerah kota bidang usaha - Asosiasi usaha pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program peningkatan daya saing produk	Pemantauan dan evaluasi penerapan nilai-nilai khas Sunda dan Betawi dalam memberikan pelayanan yang kreatif kepada konsumen.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang perindustrian - Perangkat daerah kota bidang usaha - Asosiasi usaha pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan
2. Mengembangkan sistem pengelolaan usaha pariwisata Kota yang menerapkan standar internasional melalui pembinaan dan fasilitasi sertifikasi internasional.	Program peningkatan daya saing produk	Sosialisasi standar usaha pariwisata nasional dan internasional.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang perindustrian - Perangkat daerah kota bidang usaha - Asosiasi usaha pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program peningkatan daya saing produk	Pendampingan penerapan standar usaha nasional dan internasional bagi usaha pariwisata.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang perindustrian - Perangkat daerah kota bidang usaha - Asosiasi usaha pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	Program peningkatan daya saing produk	Fasilitasi sertifikasi usaha pariwisata nasional dan internasional.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang perindustrian - Perangkat daerah kota bidang usaha - Asosiasi usaha pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program peningkatan daya saing produk	Pemantauan dan evaluasi penerapan standar nasional dan atau internasional pada usaha pariwisata Daerah.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang perindustrian - Perangkat daerah kota bidang usaha - Asosiasi usaha pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan
3. Menetapkan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan standar dan pedoman penerapan nilai kearifan lokal dalam pengelolaan usaha pariwisata.	Program peningkatan daya saing produk	Penyusunan dan penetapan standar dan pedoman penerapan nilai kearifan lokal dalam pengelolaan usaha pariwisata.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kebudayaan - Perangkat daerah kota bidang perindustrian - Perangkat daerah kota bidang usaha - Asosiasi usaha pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program peningkatan daya saing produk	Sosialisasi standar dan pedoman penerapan nilai kearifan lokal dalam pengelolaan usaha pariwisata.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kebudayaan - Perangkat daerah kota bidang perindustrian - Perangkat daerah kota bidang usaha - Asosiasi usaha pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	Program peningkatan daya saing produk	Pendampingan penerapan standar dan pedoman penerapan nilai kearifan lokal dalam pengelolaan usaha pariwisata.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kebudayaan - Perangkat daerah kota bidang perindustrian - Perangkat daerah kota bidang usaha - Asosiasi usaha pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program peningkatan daya saing produk	Pemantauan dan evaluasi penerapan standar dan pedoman penerapan nilai kearifan lokal dalam pengelolaan usaha pariwisata.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kebudayaan - Perangkat daerah kota bidang perindustrian - Asosiasi usaha pariwisata - Perangkat daerah kota bidang usaha. - Perguruan tinggi kepariwisataan
4. Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi usaha pariwisata yang berbasis atau tidak berbasis nilai kearifan lokal dan berstandar internasional.	Program peningkatan daya saing produk	Penyusunan dan penetapan mekanisme insentif dan disinsentif bagi usaha pariwisata yang berbasis nilai kearifan lokal dan berstandar internasional.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kebudayaan - Perangkat daerah kota bidang perindustrian - Perangkat daerah kota bidang usaha - Asosiasi usaha pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program peningkatan daya saing produk	Sosialisasi mekanisme insentif dan disinsentif bagi usaha pariwisata yang berbasis nilai kearifan lokal dan berstandar internasional.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kebudayaan - Perangkat daerah kota bidang perindustrian - Perangkat daerah kota bidang usaha - Asosiasi usaha pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
5. Meningkatkan pembinaan industri-industri kreatif masyarakat skala mikro, dan mengembangkan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi untuk pembinaan industri kecil dan menengah secara intensif dalam pengembangan produk, pengelolaan program-program wisata kreatif, dan pemasaran produk dan program wisata kreatif.	Program penguatan struktur industri pariwisata	Pelatihan dan pendampingan pengembangan produk bagi usaha mikro.										Perangkat daerah kota bidang perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Perangkat daerah kota bidang usaha - Asosiasi usaha pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan 	
	Program penguatan struktur industri pariwisata	Pelatihan dan pendampingan pengelolaan pariwisata kreatif bagi usaha mikro.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang perindustrian - Perangkat daerah kota bidang usaha - Asosiasi usaha pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan 	
	Program penguatan struktur industri pariwisata	Fasilitasi kerja sama antara pengelola program wisata kreatif dengan biro perjalanan wisata.											Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kebudayaan - Asosiasi usaha pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program penguatan struktur industri pariwisata	Fasilitasi pelatihan dan pendampingan pengembangan produk bagi usaha kecil dan menengah.											Perangkat daerah kota bidang perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Perangkat daerah kota bidang usaha - Asosiasi usaha pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program penguatan struktur industri pariwisata	Fasilitasi pelatihan dan pendampingan pengelolaan program wisata kreatif bagi usaha kecil dan menengah.											Perangkat daerah kota bidang usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Perangkat daerah kota bidang perindustrian - Asosiasi usaha pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan
6. Meningkatkan daya saing dan kredibilitas usaha	Program peningkatan	Sosialisasi standar internasional dan										Perangkat daerah kota bidang	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang lingkungan hidup 	

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
industri mikro, kecil, dan menengah melalui penerapan standar internasional dan prinsip-prinsip ramah lingkungan.	kredibilitas bisnis	prinsip-prinsip ramah lingkungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah.										kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang perindustrian. - Perangkat daerah kota bidang usaha - Asosiasi usaha pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program peningkatan kredibilitas bisnis	Pendampingan penerapan standar internasional dan prinsip-prinsip ramah lingkungan pada usaha mikro.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang lingkungan hidup - Perangkat daerah kota bidang perindustrian. - Perangkat daerah kota bidang usaha - Asosiasi usaha pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program peningkatan kredibilitas bisnis	Fasilitasi pendampingan penerapan standar internasional dan prinsip-prinsip ramah lingkungan pada usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang lingkungan hidup - Perangkat daerah kota bidang perindustrian. - Perangkat daerah kota bidang usaha - Asosiasi usaha pariwisata
7. Mengembangkan program-program kemitraan berkinerja tinggi antara antara industri mikro, kecil, dan menengah dengan usaha-usaha pariwisata Kota.	Program penguatan struktur industri pariwisata	Sosialisasi kemitraan berkinerja tinggi pada pengelolaan usaha pariwisata										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang usaha - Perangkat daerah kota bidang perindustrian - Asosiasi usaha pariwisata
	Program penguatan struktur industri	Fasilitasi kemitraan antara industri mikro, kecil, dan										Perangkat daerah kota bidang usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Perangkat daerah kota bidang perindustrian

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	pariwisata	menengah dengan usaha pariwisata berstandar nasional dan internasional.											- Asosiasi usaha pariwisata
	Program penguatan struktur industri pariwisata	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kemitraan mikro, kecil, dan menengah dengan usaha pariwisata berstandar nasional dan internasional.										Perangkat daerah kota bidang usaha	- Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Perangkat daerah kota bidang perindustrian - Asosiasi usaha pariwisata
8. Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi usaha pariwisata dan industri mikro, kecil, dan menengah yang telah menjalankan atau tidak menjalankan kemitraan yang saling menguntungkan dan memperkuat, berjangka panjang, serta memberikan manfaat ekonomi yang luas kepada masyarakat dan Kota.	Program penguatan struktur industri pariwisata	Penyusunan dan penetapan mekanisme insentif dan disinsentif bagi kemitraan usaha pariwisata yang berkinerja tinggi.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	- Perangkat daerah kota bidang usaha - Perangkat daerah kota bidang perindustrian - Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
	Program penguatan struktur industri pariwisata	Sosialisasi mekanisme insentif dan disinsentif bagi kemitraan usaha pariwisata yang berkinerja tinggi.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	- Perangkat daerah kota bidang usaha - Perangkat daerah kota bidang perindustrian - Perguruan tinggi bidang kepariwisataan
	Program penguatan struktur industri pariwisata	Pemberian penghargaan kepada usaha pariwisata dan industri mikro, kecil, dan menengah yang menjalankan kemitraan berkinerja tinggi.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	- Perangkat daerah kota bidang usaha - Perangkat daerah kota bidang perindustrian - Perguruan tinggi bidang kepariwisataan

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
9. Mendorong pengembangan program bersama dan terpadu dengan industri pariwisata skala nasional dalam penerapan standar nasional usaha pariwisata dan tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya;	Program pengembangan kemitraan usaha pariwisata	Fasilitasi pembentukan forum kerja sama industri pariwisata Daerah dengan industri pariwisata skala nasional.										Perangkat daerah bidang perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - KADIN Daerah - Asosiasi usaha pariwisata Daerah
	Program pengembangan kemitraan usaha pariwisata	Fasilitasi perumusan dan pelaksanaan program bersama forum kerja sama industri pariwisata Daerah.										Perangkat daerah bidang perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - KADIN Daerah - Asosiasi usaha pariwisata Daerah
	Program pengembangan kemitraan usaha pariwisata	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bersama forum kerja sama industri pariwisata Daerah.										Perangkat daerah bidang perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - KADIN Daerah - Asosiasi usaha pariwisata Daerah
10. Mendorong pengembangan program pembinaan berkelanjutan antara industri pariwisata skala	Program pengembangan kemitraan	Fasilitasi penyepakatan program pembinaan antara										Perangkat daerah bidang perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Perangkat daerah kota bidang usaha

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
internasional dengan industri pariwisata di Kota dalam penerapan standar internasional dan pengelolaan usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan.	usaha pariwisata	industri pariwisata skala internasional dengan industri pariwisata di Daerah dalam penerapan standar internasional.											<ul style="list-style-type: none"> - KADIN Daerah - Asosiasi usaha pariwisata Daerah
	Program pengembangan kemitraan usaha pariwisata	Fasilitasi penyepakatan program pembinaan antara industri pariwisata skala internasional dengan industri pariwisata di Daerah dalam pengelolaan usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan.										Perangkat daerah bidang perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Perangkat daerah kota bidang usaha - KADIN Daerah - Asosiasi usaha pariwisata Daerah
	Program pengembangan kemitraan usaha pariwisata	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan antara industri pariwisata skala internasional dengan industri pariwisata di Daerah.											Perangkat daerah bidang perindustrian

TABEL III. PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
1. Mengembangkan pelayanan informasi pariwisata yang akurat, mutakhir, dan terpadu berbasis teknologi informasi.	Program pengembangan informasi pariwisata	Inventarisasi dan pemutakhiran data dan informasi pariwisata Daerah										Perangkat daerah kota bidang komunikasi dan informatika	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Perangkat daerah kota bidang statistik - Perguruan tinggi kepariwisataan 	
	Program pengembangan informasi pariwisata	Pembuatan sistem informasi pariwisata terpadu berbasis kecamatan melalui <i>digital dashboard</i>										Perangkat daerah kota bidang komunikasi dan informatika	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Perangkat daerah kota bidang statistik - Perguruan tinggi kepariwisataan 	
	Program pengembangan informasi pariwisata	Pembuatan <i>e-book</i> tahunan statistik pariwisata Daerah											Perangkat daerah kota bidang komunikasi dan informatika	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Perangkat daerah kota bidang statistik - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan informasi pariwisata	Pembuatan <i>e-commerce</i> produk pariwisata Daerah											Perangkat daerah kota bidang komunikasi dan informatika	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Asosiasi usaha pariwisata kota
2. Mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata berbasis teknologi informasi untuk mengukur kinerja program-program pemasaran dengan capaian target jumlah kunjungan wisatawan.	Program pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata	Penyusunan mekanisme pemantauan dan evaluasi program-program pemasaran pariwisata Daerah										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Asosiasi usaha pariwisata kota - Perguruan tinggi kepariwisataan 	
	Program pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata	Perancangan aplikasi teknologi informasi untuk mekanisme pemantauan dan evaluasi program pemasaran pariwisata Daerah											Perangkat daerah kota bidang komunikasi dan informatika	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Asosiasi usaha pariwisata kota - Perguruan tinggi kepariwisataan

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	Program pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata	Pemutakhiran dan pemeliharaan aplikasi teknologi informasi.										Perangkat daerah kota bidang komunikasi dan informatika	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan Asosiasi usaha pariwisata kota
	Program pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata	Pemantauan dan evaluasi kinerja program pemasaran pariwisata dalam mencapai target kunjungan wisatawan.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> Asosiasi usaha pariwisata kota Perguruan tinggi kepariwisataan
3. Mengembangkan pasar wisatawan Daerah diarahkan pada pasar pariwisata berkualitas, yaitu pasar pariwisata dengan lama tinggal yang panjang, pengeluaran berwisata yang besar, serta kesadaran terhadap kelestarian alam dan budaya yang tinggi.	Program pengembangan pasar wisatawan	<i>Market intelligence</i> untuk pasar wisatawan berkualitas bagi produk pariwisata sejarah dan <i>heritage</i> , alam perkotaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat daerah kota bidang statistik Asosiasi usaha pariwisata kota Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan pasar wisatawan	Sosialisasi hasil <i>market intelligence</i> kepada para pemangku kepentingan dan pengambil keputusan.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat daerah kota bidang statistik Asosiasi usaha pariwisata kota Asosiasi profesi pariwisata Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan promosi pariwisata	Penyepakatan pembagian peran dalam melakukan promosi berdasarkan hasil <i>market intelligence</i> .										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat daerah kota bidang statistik Asosiasi usaha pariwisata kota Asosiasi profesi pariwisata Perguruan tinggi kepariwisataan
4. Menetapkan pasar	Program	Sosialisasi segmen										Perangkat daerah kota	<ul style="list-style-type: none"> Asosiasi usaha pariwisata

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
wisatawan pelajar/mahasiswa, wisatawan dari Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sumatera, serta wisatawan Belanda, Malaysia, dan Singapura sebagai pasar utama pariwisata Kota.	pengembangan pasar wisatawan	pasar wisatawan utama Daerah kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.										bidang kepariwisataan	kota – Asosiasi profesi pariwisata kota – Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan pasar wisatawan	<i>Focus Group Discussion</i> tentang potensi pasar utama dan langkah-langkah strategis pemasaran untuk menjangkaunya.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	– Asosiasi usaha pariwisata kota – Asosiasi profesi pariwisata kota – Perguruan tinggi kepariwisataan
5. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang karakteristik, kebutuhan, dan preferensi pasar pariwisata utama dan potensial agar dapat memberikan pengalaman lebih kepada wisatawan, serta mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi dari wisatawan.	Program pengembangan pasar wisatawan	Penelitian profil segmen pasar wisatawan pelajar/mahasiswa, wisatawan dari Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sumatera, serta wisatawan Belanda, Malaysia, dan Singapura										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	– Asosiasi usaha pariwisata kota – Asosiasi profesi pariwisata kota – Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan pasar wisatawan	Penelitian pengembangan produk pariwisata yang sesuai minat pasar wisatawan utama Daerah.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	– Asosiasi usaha pariwisata kota – Asosiasi profesi pariwisata kota – Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan pasar wisatawan	Penyusunan <i>travel pattern</i> segmen pasar utama wisatawan Daerah.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	– Asosiasi usaha pariwisata kota – Asosiasi profesi pariwisata kota – Perguruan tinggi kepariwisataan

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	Program pengembangan pasar wisatawan	Penelitian tingkat kepuasan wisatawan terhadap produk pariwisata Daerah.										<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Asosiasi usaha pariwisata kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Asosiasi profesi pariwisata kota - Perguruan tinggi kepariwisataan
6. Menetapkan target jumlah wisatawan berdasarkan pertimbangan rata-rata jumlah kunjungan wisatawan Kota, target pertumbuhan wisatawan Jawa Barat dan nasional, serta kajian terhadap dampak dari perkembangan pariwisata Kota.	Program pengembangan pasar wisatawan	Penyusunan dan penetapan kerangka dan metode penghitungan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara Daerah.										Perangkat daerah kota bidang statistik	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Asosiasi usaha pariwisata - Asosiasi profesi pariwisata kota - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan pasar wisatawan	Penghitungan jumlah kunjungan wisatawan Kota Depok.										Perangkat daerah kota bidang statistik	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Asosiasi usaha pariwisata - Asosiasi profesi pariwisata kota - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan pasar wisatawan	Pemutakhiran kerangka dan metode penghitungan jumlah kunjungan wisatawan Daerah.											Perangkat daerah kota bidang statistik
7. Meningkatkan	Program	Pembuatan situs										Perangkat daerah kota	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
promosi pariwisata melalui internet dengan pengembangan situs web promosi pariwisata tematik, promosi pariwisata berbasis animasi, serta pemanfaatan media sosial yang terkendali.	pengembangan promosi pariwisata	web promosi pariwisata tematik Daerah (sejarah dan <i>heritage</i> , alam perkotaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.										bidang komunikasi dan informatika	bidang kepariwisataan – Asosiasi usaha pariwisata – Asosiasi profesi pariwisata kota – Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan promosi pariwisata	Pembuatan animasi untuk promosi produk pariwisata tematik Kota Depok										Perangkat daerah kota bidang komunikasi dan informatika	– Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan – Asosiasi usaha pariwisata – Asosiasi profesi pariwisata kota – Perguruan tinggi bidang informatika
	Program pengembangan promosi pariwisata	Pelatihan pembuatan dan pemanfaatan media sosial yang terkendali.										Perangkat daerah kota bidang komunikasi dan informatika	– Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan – Asosiasi usaha pariwisata – Asosiasi profesi pariwisata kota – Perguruan tinggi bidang informatika
	Program pengembangan promosi pariwisata	Pembuatan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan pengendalian media sosial untuk promosi pariwisata Daerah.										Perangkat daerah kota bidang komunikasi dan informatika	– Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan – Asosiasi usaha pariwisata – Asosiasi profesi pariwisata kota – Perguruan tinggi bidang informatika
8. Menerapkan konsep pemasaran bertanggung jawab pada setiap program pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah maupun usaha pariwisata	Program pengembangan pemasaran bertanggung jawab	Penyusunan pedoman pemasaran bertanggung jawab bagi pelaku usaha pariwisata dan KSPK/KPPK Daerah.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	– Asosiasi usaha pariwisata – Asosiasi profesi pariwisata kota – Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan	Sosialisasi pedoman										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	– Asosiasi usaha pariwisata – Asosiasi profesi pariwisata

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	pemasaran bertanggung jawab	pemasaran bertanggung jawab bagi pelaku usaha pariwisata dan KSPK/KPPK Daerah											kota - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan pemasaran bertanggung jawab	Penyepakatan program bersama dalam pemasaran bertanggung jawab antara pelaku usaha dan Pemerintah Daerah.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	- Asosiasi usaha pariwisata - Asosiasi profesi pariwisata kota
	Program pengembangan pemasaran bertanggung jawab	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bersama dalam pemasaran bertanggung jawab.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	- Asosiasi usaha pariwisata - Asosiasi profesi pariwisata kota - Perguruan tinggi kepariwisataan
9. Membentuk citra pariwisata Kota sebagai destinasi pariwisata pendidikan dan perkotaan berbasis sejarah, alam perkotaan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan melalui perumusan rencana pemasaran pariwisata yang tepat dan efektif.	Program pembangunan citra pariwisata Daerah	Penyusunan kajian terkait <i>branding</i> pariwisata Daerah.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	- Asosiasi usaha pariwisata - Asosiasi profesi pariwisata kota - Perguruan tinggi bidang pemasaran
	Program pembangunan citra pariwisata Daerah	Sayembara pembuatan logo untuk <i>branding</i> pariwisata Daerah.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	- Asosiasi usaha pariwisata - Asosiasi profesi pariwisata kota - Perguruan tinggi bidang pemasaran
	Program pembangunan citra pariwisata Daerah	Sosialisasi <i>branding</i> pariwisata Daerah kepada para pelaku usaha pariwisata										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	- Asosiasi usaha pariwisata - Asosiasi profesi pariwisata kota
	Program pembangunan	Penyelenggaraan even promosi										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	- Asosiasi usaha pariwisata - Asosiasi profesi pariwisata

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	citra pariwisata Daerah	untuk mengenalkan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata sejarah dan heritage, alam perkotaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.											kota - Perguruan tinggi bidang pemasaran
	Program pembangunan citra pariwisata Daerah	Pemberlakuan penggunaan <i>brand</i> destinasi pariwisata pada setiap alat promosi maupun administrasi pariwisata Daerah.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	- Asosiasi usaha pariwisata - Asosiasi profesi pariwisata kota - Perguruan tinggi bidang pemasaran
10. Mengembangkan sistem pemasaran terpadu dengan sektor lain, khususnya perdagangan dan investasi, dengan pariwisata Provinsi Jawa Barat dan Indonesia.	Program kemitraan pemasaran pariwisata	Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	Bagian organisasi sekretariat daerah kota
	Program kemitraan pemasaran pariwisata	Penyusunan dan penetapan program promosi bersama dengan sektor perdagangan dan investasi.										Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan daerah	- Perangkat daerah bidang kepariwisataan - Perangkat daerah bidang perdagangan - Perangkat daerah bidang penanaman modal
	Program kemitraan pemasaran pariwisata	Sosialisasi dan sinkronisasi program promosi bersama dengan sektor perdagangan dan investasi.										Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan daerah	- Perangkat daerah bidang kepariwisataan - Perangkat daerah bidang perdagangan - Perangkat daerah bidang penanaman modal
	Program kemitraan	Pembuatan situs web promosi										Perangkat daerah kota bidang komunikasi dan	- Perangkat daerah bidang

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	pemasaran pariwisata	terpadu pariwisata, perdagangan, dan investasi.										informatika	kepariwisataan – Perangkat daerah bidang perdagangan – Perangkat daerah bidang penanaman modal
	Program kemitraan pemasaran pariwisata	Penyelenggaraan <i>roadshow</i> promosi terpadu pariwisata, perdagangan, dan investasi pariwisata di tingkat nasional dan internasional										– Perangkat daerah bidang kepariwisataan – Perangkat daerah bidang perdagangan – Perangkat daerah bidang penanaman modal	– Asosiasi usaha pariwisata – Asosiasi profesi pariwisata kota
	Program kemitraan pemasaran pariwisata	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program promosi bersama dengan sektor perdagangan dan investasi.										Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan daerah	– Perangkat daerah bidang kepariwisataan – Perangkat daerah bidang perdagangan – Perangkat daerah bidang penanaman modal
11. Membangun Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota sebagai mitra utama Pemerintah Kota dalam membentuk citra destinasi pariwisata berdaya saing internasional melalui kegiatan promosi.	Program pengembangan kelembagaan pemasaran pariwisata	Pembentukan dan penetapan Peraturan Walikota tentang Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	– Sekretariat daerah kota – Asosiasi usaha pariwisata Kota – Asosiasi profesi pariwisata Kota – Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan kelembagaan pemasaran pariwisata	Sinkronisasi dan penyepakatan pembagian peran antara Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota dengan Perangkat Daerah Kota Bidang Kepariwisata dalam pemasaran pariwisata Kota.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	– Sekretariat daerah kota – Asosiasi usaha pariwisata Kota – Asosiasi profesi pariwisata Kota – Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program	Pendampingan										Perangkat daerah kota	– Perguruan tinggi

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	pengembangan kelembagaan pemasaran pariwisata	penguatan organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota.										bidang kepariwisataan	kepariwisataan
	Program pengembangan promosi pariwisata	Dukungan dan fasilitasi program Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Asosiasi usaha pariwisata Kota - Asosiasi profesi pariwisata Kota - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan kelembagaan pemasaran pariwisata	Pemantauan dan evaluasi kinerja Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota.										Sekretariat Daerah Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Asosiasi usaha pariwisata Kota - Asosiasi profesi pariwisata Kota - Perguruan tinggi kepariwisataan

**TABEL IV. PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN
KEPARIWISATAAN**

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
1. Melakukan transformasi struktur dan sistem kelembagaan Pemerintah Kota di bidang kepariwisataan untuk mewujudkan keterpaduan dan percepatan pembangunan kepariwisataan sebagai sektor unggulan Kota.	Program pengembangan organisasi Pemerintahan Daerah di bidang kepariwisataan	Penyusunan rancangan transformasi struktur dan sistem organisasi di Pemerintah Daerah terkait bidang kepariwisataan.										Bagian organisasi Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Daerah - Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Asosiasi usaha pariwisata kota - Perguruan Tinggi Kepariwisataaan 	
	Program pengembangan organisasi Pemerintahan Daerah di bidang kepariwisataan	Pendampingan pelaksanaan transformasi struktur dan sistem organisasi di Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.											Bagian organisasi Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Asosiasi usaha pariwisata kota - Perguruan Tinggi Kepariwisataaan
	Program pengembangan organisasi Pemerintahan Daerah di bidang kepariwisataan	Evaluasi kinerja dan efektivitas transformasi struktur dan sistem organisasi											Bagian organisasi Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat Daerah - Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Perguruan Tinggi Kepariwisataaan - Asosiasi usaha pariwisata kota

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
2. Membentuk dan membina organisasi pariwisata daerah agar mampu menjalankan program-program transformasi untuk mewujudkan percepatan pembangunan kepariwisataan Kota.	Program pengembangan organisasi usaha dan profesi pariwisata	Fasilitasi pembentukan organisasi usaha dan profesi pariwisata Daerah.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Asosiasi usaha pariwisata provinsi - Asosiasi profesi pariwisata provinsi - Pengelola daya tarik wisata Daerah - Pengelola usaha Daerah pariwisata - Pelaku usaha pariwisata Daerah
		Pelatihan dan pendampingan organisasi usaha dan profesi pariwisata dalam menjalankan program-program transformasi di bidang kepariwisataan.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Asosiasi usaha pariwisata provinsi - Asosiasi profesi pariwisata provinsi - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan organisasi usaha dan profesi pariwisata	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan transformasi organisasi usaha dan profesi pariwisata Daerah.											Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan
3. Menetapkan dan menerapkan sistem pengelolaan pariwisata terpadu yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal, perlindungan terhadap lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan kualitas destinasi pariwisata.	Program pengembangan regulasi dan mekanisme operasional kepariwisataan	Penyusunan petunjuk teknis sistem pengelolaan pariwisata terpadu berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal, perlindungan terhadap lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan kualitas destinasi pariwisata										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan - Perangkat daerah kota bidang kebudayaan - Perangkat daerah kota bidang lingkungan hidup - Asosiasi usaha pariwisata kota - Asosiasi profesi pariwisata kota - Perguruan tinggi kepariwisataan

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	Program pengembangan regulasi dan mekanisme operasional kepariwisataan	Pelatihan dan pendampingan penerapan petunjuk teknis sistem pengembangan dan pengelolaan pariwisata terpadu.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan - Perangkat daerah kota bidang kebudayaan - Perangkat daerah kota bidang lingkungan hidup - Asosiasi usaha pariwisata kota - Asosiasi profesi pariwisata kota - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan regulasi dan mekanisme operasional kepariwisataan	Evaluasi peningkatan kinerja pengelolaan terpadu pariwisata Daerah.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan - Perangkat daerah kota bidang kebudayaan - Perangkat daerah kota bidang lingkungan hidup - Asosiasi usaha pariwisata kota - Asosiasi profesi pariwisata kota - Perguruan tinggi kepariwisataan
4. Menyederhanakan prosedur dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam investasi pariwisata dalam mewujudkan kelembagaan investasi yang efektif dan berkinerja tinggi.	Program pengembangan regulasi dan mekanisme operasional	Evaluasi regulasi dan kelembagaan dalam rangka peningkatan dan percepatan pertumbuhan investasi pariwisata Daerah.										Perangkat daerah kota bidang penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian hukum sekretariat Daerah - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Asosiasi usaha pariwisata kota - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program	Penyusunan dan										Perangkat	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian hukum sekretariat

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	pengembangan regulasi dan mekanisme operasional	penetapan regulasi investasi untuk penyederhanaan pelayanan investasi pariwisata Daerah.										daerah kota bidang penanaman modal	Daerah – Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan – Asosiasi usaha pariwisata kota – Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan regulasi dan mekanisme operasional	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan regulasi investasi yang baru.										Perangkat daerah kota bidang penanaman modal	– Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan – Asosiasi usaha pariwisata kota – Perguruan tinggi kepariwisataan
5. Mengembangkan mekanisme pemantauan dan pengendalian perkembangan yang berkekuatan hukum pada setiap upaya implementasi perencanaan dan pengelolaan pariwisata Daerah.	Program pengembangan regulasi dan mekanisme operasional kepariwisataan	Penyusunan dan penetapan peraturan daerah tentang pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan kepariwisataan Daerah.										Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan	– Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan – Asosiasi usaha pariwisata kota – Asosiasi profesi pariwisata kota – Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan regulasi dan mekanisme operasional kepariwisataan	Sosialisasi dan penyepakatan pembagian peran dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan kepariwisataan Daerah.										Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan	– Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan – Asosiasi usaha pariwisata kota – Asosiasi profesi pariwisata kota – Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan regulasi dan mekanisme operasional kepariwisataan	Pembentukan tim pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan kepariwisataan Daerah.										Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan	– Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan – Asosiasi usaha pariwisata kota – Asosiasi profesi pariwisata kota – Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program	Pelaporan berkala										Perangkat	– Perangkat daerah kota bidang

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	pengembangan regulasi dan mekanisme operasional kepariwisataan	dan aksi pengendalian dampak penyelenggaraan kepariwisataan.										daerah kota bidang perencanaan pembangunan	kepariwisataan – Asosiasi usaha pariwisata kota – Asosiasi profesi pariwisata kota – Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan regulasi dan mekanisme operasional kepariwisataan	Evaluasi kinerja program pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan kepariwisataan Daerah.										Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan	– Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan – Asosiasi usaha pariwisata kota – Asosiasi profesi pariwisata kota – Perguruan tinggi kepariwisataan
6. Membentuk dan menetapkan forum tata kelola pariwisata Kota yang mencakup seluruh unsur Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota, pelaku usaha, akademisi, masyarakat, dan media yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan.	Program pengembangan koordinasi lintas sektor dan lintas pelaku	Pembentukan dan penetapan forum tata kelola pariwisata Daerah.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	– Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan – Asosiasi usaha pariwisata – Asosiasi profesi pariwisata – Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan koordinasi lintas sektor dan lintas pelaku	Fasilitasi penyusunan program kerja forum tata kelola pariwisata Daerah.										Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan	– Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan – Asosiasi usaha pariwisata – Asosiasi profesi pariwisata – Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan koordinasi lintas sektor dan lintas pelaku	Fasilitasi penguatan organisasi forum tata kelola pariwisata Daerah.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	– Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan – Asosiasi usaha pariwisata – Asosiasi profesi pariwisata – Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan	Fasilitasi pelaksanaan kerja										Perangkat daerah kota	– Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
	koordinasi lintas sektor dan lintas pelaku	sama antara forum tata kelola pariwisata Daerah dengan asosiasi usaha pariwisata dan asosiasi profesi pariwisata.										bidang perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Asosiasi usaha pariwisata - Asosiasi profesi pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan koordinasi lintas sektor dan lintas pelaku	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tata kelola pariwisata Daerah.										Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Asosiasi usaha pariwisata - Asosiasi profesi pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan
7. Mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang efektif dan harmonis dalam menguatkan fungsi dan peran forum tata kelola pariwisata Kota.	Program pengembangan koordinasi lintas sektor dan lintas pelaku	Penyusunan mekanisme komunikasi dan koordinasi forum tata kelola pariwisata Daerah dengan Pemerintah Daerah kota, Pemerintah Daerah Provinsi, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi pariwisata.										Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Asosiasi usaha pariwisata - Asosiasi profesi pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan koordinasi lintas sektor dan lintas pelaku	Perumusan dan penetapan peraturan daerah tentang koordinasi lintas sektor dalam pembangunan kepariwisataan daerah.										Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Asosiasi usaha pariwisata - Asosiasi profesi pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan koordinasi lintas	Evaluasi komunikasi dan koordinasi lintas sektor dalam										Perangkat daerah kota bidang	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Asosiasi usaha pariwisata

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	
	sektor dan lintas pelaku	pembangunan dan pengelolaan pariwisata Daerah.										perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Asosiasi profesi pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan 	
8. Mengembangkan program-program sertifikasi bagi sumber daya manusia di bidang perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan Kota.	Program pengembangan sumber daya manusia	Sosialisasi standar kompetensi di bidang kepariwisataan dan perencanaan pembangunan.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan - Asosiasi profesi di bidang perencanaan pembangunan - Asosiasi profesi pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan 	
	Program pengembangan sumber daya manusia	Pelatihan persiapan sertifikasi SDM di bidang perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan.										Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan - Asosiasi profesi di bidang perencanaan pembangunan - Asosiasi profesi pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan 	
	Program pengembangan sumber daya manusia	Fasilitasi sertifikasi SDM di bidang perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan.											Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan - Asosiasi profesi di bidang perencanaan pembangunan - Asosiasi profesi pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan sumber daya manusia	Pemberian penghargaan bagi SDM yang berkinerja baik ddi bidang perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan.											Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang perencanaan pembangunan - Asosiasi profesi di bidang perencanaan pembangunan - Asosiasi profesi pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan
9. Mengembangkan transformasi pada sumber daya manusia	Program pengembangan sumber daya	Penyusunan dan penetapan <i>roadmap</i> transformasi sumber										Perangkat daerah kota bidang	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Asosiasi profesi di bidang 	

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
aparatur Pemerintah Kota untuk melakukan percepatan pembangunan kepariwisataan Kota.	manusia	daya aparatur di Pemerintahan Daerah dalam rangka percepatan pembangunan kepariwisataan Daerah.										kepegawaian	perencanaan pembangunan – Asosiasi profesi pariwisata – Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan sumber daya manusia	Sosialisasi <i>roadmap</i> transformasi sumber daya aparatur di Pemerintahan Daerah.										Perangkat daerah kota bidang kepegawaian	– Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan – Asosiasi profesi di bidang perencanaan pembangunan – Asosiasi profesi pariwisata – Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan sumber daya manusia	Pembentukan tim pelaksana transformasi sumber daya aparatur di Pemerintahan Daerah.										Perangkat daerah kota bidang kepegawaian	– Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan – Asosiasi profesi di bidang perencanaan pembangunan – Asosiasi profesi pariwisata – Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan sumber daya manusia	Pendampingan pelaksanaan transformasi sumber daya aparatur di Pemerintahan Daerah.										Perangkat daerah kota bidang kepegawaian	– Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan – Asosiasi profesi di bidang perencanaan pembangunan – Asosiasi profesi pariwisata – Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan sumber daya manusia	Evaluasi kinerja dan efektivitas pelaksanaan transformasi sumber daya aparatur.										Perangkat daerah kota bidang kepegawaian	– Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan – Asosiasi profesi di bidang perencanaan pembangunan – Asosiasi profesi pariwisata – Perguruan tinggi kepariwisataan
10. Mengembangkan mekanisme insentif bagi sumber daya manusia pariwisata	Program pengembangan sumber daya manusia	Penyusunan dan penetapan mekanisme insentif bagi SDM yang										Perangkat daerah kota bidang kepegawaian	– Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan – Asosiasi profesi di bidang perencanaan pembangunan

STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
yang berkontribusi terhadap percepatan pembangunan kepariwisataan Kota.		menjadi teladan dalam percepatan pembangunan kepariwisataan Daerah.											<ul style="list-style-type: none"> - Asosiasi profesi pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan sumber daya manusia	Sosialisasi mekanisme insentif bagi SDM yang menjadi teladan dalam percepatan pembangunan kepariwisataan Daerah.										Perangkat daerah kota bidang kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Asosiasi profesi di bidang perencanaan pembangunan - Asosiasi profesi pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan
	Program pengembangan sumber daya manusia	Pemberian insentif bagi SDM yang menjadi teladan dalam percepatan pembangunan kepariwisataan Daerah.										Perangkat daerah kota bidang kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat daerah kota bidang kepariwisataan - Asosiasi profesi di bidang perencanaan pembangunan - Asosiasi profesi pariwisata - Perguruan tinggi kepariwisataan